



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 74 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal guna menjamin hak konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memastikan pemenuhan pelayanan dasar secara minimal kepada masyarakat di Kabupaten Purworejo, diperlukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal yang disusun dalam rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penyusunan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2028;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah penjelasan strategis yang akan dicapai dalam periode tertentu sebagai pedoman dan arahan dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
21. Tim Penerapan SPM adalah tim gabungan yang beranggotakan PD penyelenggara urusan SPM beserta PD yang menunjang Penerapan SPM.

Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2028 merupakan dokumen perencanaan sebagai:

- a. pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 3

- (1) Sistematika Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : kondisi dan permasalahan pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. bab III : strategi dan pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. bab IV : pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penerapan SPM; dan
 - e. bab V : kesimpulan dan saran.
- (2) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 74SERIE NOMOR 60**



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2024-2028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat *Allah Subhaanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM Daerah) Kabupaten Purworejo, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN.....	2
1.3 KONDISI UMUM DAERAH.....	3
1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah	3
1.3.2 Topografi.....	4
1.3.3 Hidrologi	7
1.3.4 Kondisi Demografi.....	7
1.3.5 Kawasan Rawan Bencana.....	11
1.4 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN PEREKONOMIAN.....	14
1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi	14
1.4.2 Laju Inflasi.....	19
1.4.3 Kemiskinan.....	20
1.4.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	23
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM ..	29
2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM	29
2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM	32
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	40
3.1 SPM Pelayanan Dasar.....	40
3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM.....	52
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM	121
4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM	121
4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM	126
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	128
5.1 Kesimpulan.....	128
5.2 Saran	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo	4
Tabel 1. 2 Pembagian Administrasi Kecamatan Tahun 2023	4
Tabel 1. 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2023	7
Tabel 1. 4 Prosentase Penduduk Menurut Usia Di Kabupaten Purworejo tahun 2015-2023	9
Tabel 1. 5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah).....	15
Tabel 1. 6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah).....	16
Tabel 1. 7 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (%)	17
Tabel 1. 8 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (%)	18
Tabel 1. 9 PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 (juta rupiah)	18
Tabel 1. 10 Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023	20
Tabel 1. 11 Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023	22
Tabel 1. 12 Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023	23
Tabel 2. 1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	29
Tabel 2. 2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	29
Tabel 2. 3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	30

Tabel 2. 4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	30
Tabel 2. 5 Kondisi Capaian SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023	31
Tabel 2. 6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	31
Tabel 2. 7 Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023.....	32
Tabel 2. 8 Permasalahan Dan Alternatif Solusi Pelaksana Pelayanan Spm Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023	33
Tabel 2. 9 Permasalahan Dan Alternatif Solusi Pelaksana Pelayanan SPM Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023	34
Tabel 2. 10 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2023.....	35
Tabel 2. 11 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023	36
Tabel 2. 12 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023	38
Tabel 2. 13 Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2023	39
Tabel 3. 1 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Pendidikan	40
Tabel 3. 2 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Kesehatan	45
Tabel 3. 3 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Pekerjaan Umum	46
Tabel 3. 4 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Perumahan Rakyat	47
Tabel 3. 5 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ...	48
Tabel 3. 6 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Sosial.....	51
Tabel 3. 7 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Purworejo 2024-2028.....	52
Tabel 3. 8 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Purworejo 2024-2028.....	61

Tabel 3. 9 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purworejo 2024-2028	82
Tabel 3. 10 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Purworejo 2024-2028	89
Tabel 3. 11 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Purworejo 2024-2028	92
Tabel 3. 12 Renaksi Penerapan SPM Bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purworejo 2024-2028	98
Tabel 3. 13 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Purworejo 2024-2028	101
Tabel 4. 1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purworejo	3
Gambar 1. 2 Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo	5
Gambar 1. 3 Peta Topografi Kabupaten Purworejo	6
Gambar 1. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2023	9
Gambar 1. 5 Peta Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo.....	11
Gambar 1. 6 Peta Daerah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Purworejo	12
Gambar 1. 7 Peta Daerah Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Purworejo	13
Gambar 1. 8 Peta Daerah Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Purworejo	14
Gambar 1. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesian Tahun 2019-2023 (%).....	15
Gambar 1. 10 Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	19
Gambar 1. 11 Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019 – 2023.....	21
Gambar 1. 12 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo Tahun 2019- 2023	22
Gambar 1. 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019 – 2023	23
Gambar 1. 14 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023.....	24
Gambar 1. 15 Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	25
Gambar 1. 16 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023.....	25
Gambar 1. 17 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	26
Gambar 1. 18 Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023	26
Gambar 1. 19 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (ribu rupiah/orang/tahun).....	27
Gambar 1. 20 Pengeluaran Per Kapita Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (ribu rupiah/orang/tahun).....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis SPM terdiri atas SPM:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 298 ayat (1) yaitu “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam Pasal

14 ayat (2) juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2 MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Maksud Penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM adalah menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM adalah:

- 1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- 2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
- 3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan

- 4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

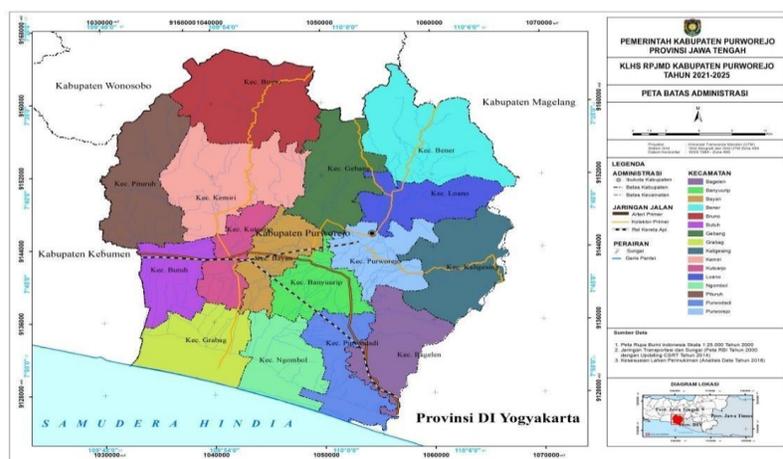
1.3 KONDISI UMUM DAERAH

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Purworejo yang beribukota di Purworejo, terletak antara 109° 47' 28" sampai 110° 8' 20" Bujur Timur dan 7° 32' sampai 7° 54' Lintang Selatan, merupakan salah satu dari tiga puluh lima kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo;
- b. Sebelah selatan : Samudra Hindia;
- c. Sebelah timur : Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY;
- d. Sebelah barat : Kabupaten Kebumen.

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purworejo



Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020

Luas administrasi Kabupaten Purworejo adalah sebesar 1.081,45 km². Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo memiliki persentase luas 3,18% dari total luasan provinsi. Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa.

Tabel 1. 1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km2)
1	2	3	4
1.	Grabag	32	67,80
2.	Ngombol	57	59,33
3.	Purwodadi	40	56,15
4.	Bagelen	17	63,44
5.	Kaligesing	21	78,33
6.	Purworejo	25	53,25
7.	Banyuurip	27	47,78
8.	Bayan	26	44,66
9.	Kutoarjo	27	39,20
10.	Butuh	41	47,21
11.	Pituruh	49	89,01
12.	Kemiri	40	103,15
13.	Bruno	18	105,68
14.	Gebang	25	70,51
15.	Loano	21	53,51
16.	Bener	28	102,44
	Jumlah	494	1.081,45

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

Pembagian Administrasi berdasarkan kecamatan, jumlah desa, kelurahan, dusun, Rt dan Rw tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Pembagian Administrasi Kecamatan Tahun 2023

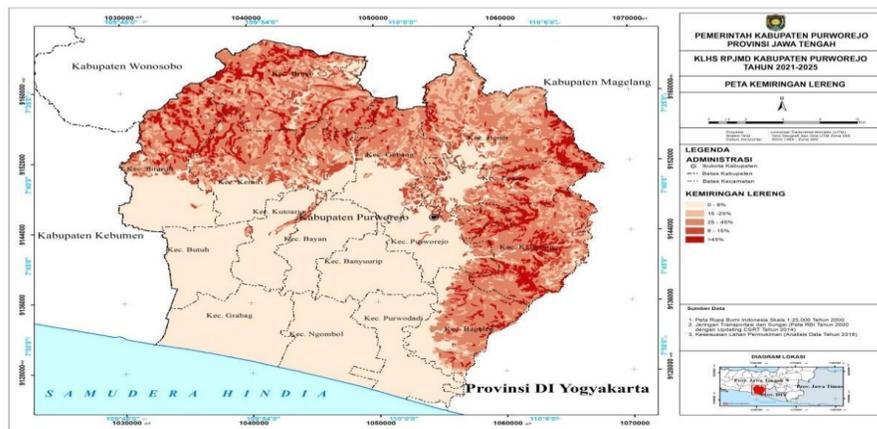
No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun	RT	RW
1	Grabag	32	0	117	232	93
2	Ngombol	57	0	82	206	87
3	Purwodadi	40	0	102	277	99
4	Bagelen	17	0	73	287	78
5	Kaligesing	21	0	81	277	83
6	Purworejo	11	14	61	562	153
7	Banyuurip	24	3	105	328	108
8	Bayan	25	1	89	238	94
9	Kutoarjo	21	6	77	369	139
10	Butuh	41	0	105	281	114
11	Pituruh	49	0	156	289	114
12	Kemiri	40	0	143	300	114
13	Bruno	18	0	105	320	84
14	Gebang	24	1	118	90	243
15	Loano	21	0	112	165	99
16	Bener	28	0	134	303	103

Sumber: Pemerintah Kabupaten Purworejo, 2024

1.3.2 Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25–1.050 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 mdpl.

Gambar 1. 2 Peta Kelerengn Kabupaten Purworejo



Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Kondisi kemiringan lereng atau kelerengn Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:

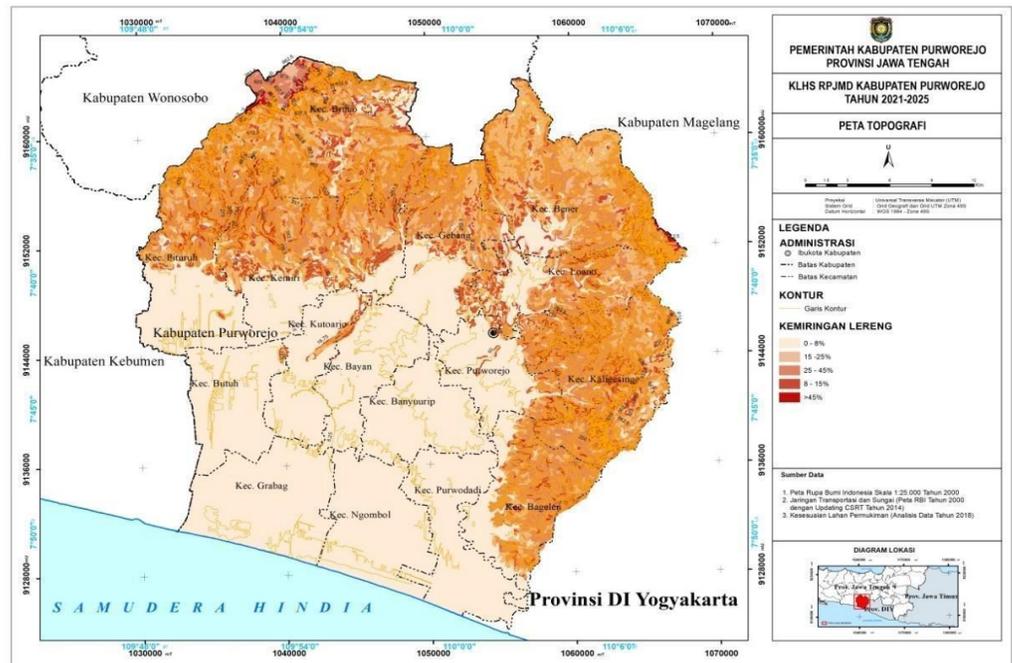
- Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo; Wilayah dengan kelas kelerengn datar ini juga didominasi oleh aktivitas budidaya yang meliputi permukiman, kegiatan produksi, pertanian lahan kering.
- Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;
- Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo;
- Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh;

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 - 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut:

- Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1.064 meter di atas permukaan air laut.

Kenampakan kondisi topografi Kabupaten Purworejo dapat diamati pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. 3 Peta Topografi Kabupaten Purworejo



Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020

Deskripsi mengenai iklim untuk Kabupaten Purworejo lebih dibatasi pada deskripsi mengenai curah hujan dan suhu, dengan pertimbangan bahwa kedua unsur iklim tersebut sangat dominan dengan kerawanan wilayah terhadap ancaman bencana khususnya banjir, kekeringan, dan longsor. Di samping itu, aktivitas sektor pertanian yang menjadi sektor basis bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kedua unsur iklim tersebut, khususnya curah hujan.

Kabupaten Purworejo memiliki iklim tropis basah dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang datang setiap enam bulan silih berganti. Rata-rata suhu udara antara 19°C–28°C dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar 620 mm/tahun hingga 3.720 mm/tahun, sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 70%–90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 311 mm dan bulan Maret sebesar 289 mm. Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjuanan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (*trigger factor*) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo.

1.3.3 Hidrologi

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

1.3.4 Kondisi Demografi

1.3.4.1 Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo di tahun 2023 mengalami peningkatan, pada tahun 2022 sebanyak 778.257 jiwa tahun 2023 jumlah penduduk 788.265 jiwa. Ada penambahan penduduk sebanyak 10.008 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 sebesar 1,29 persen. Komposisi penduduk pada tahun 2023 adalah 50,07 persen penduduk laki-laki dan 49,93 persen penduduk perempuan.

Tabel 1. 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020 – 2023 (%)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk 2023 (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	2	4	5	6	7	8
1	Grabag	50.573	1,70	67,80	778	101
2	Ngombol	35.826	1,56	59,33	648	98
3	Purwodadi	42.291	1,53	56,15	783	97
4	Bagelen	30.829	0,94	63,44	483	98
5	Kaligesing	32.339	1,20	78,33	432	101
6	Purworejo	85.483	-0,07	53,25	1.621	98
7	Banyuurip	43.951	1,12	47,78	975	97
8	Bayan	52.699	1,49	44,66	1.220	99
9	Kutoarjo	62.866	0,99	39,20	1.686	98
10	Butuh	42.728	1,14	47,21	937	98

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2020 – 2023 (%)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk 2023 (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	2	4	5	6	7	8
11	Pituruh	52.587	1,47	89,01	679	102
12	Kemiri	60.272	1,73	103,15	654	102
13	Bruno	54.551	2,16	105,68	503	107
14	Gebang	44.220	1,20	70,51	615	103
15	Loano	38.891	1,30	53,51	724	102
16	Bener	58.159	1,81	102,44	618	103
Jumlah		788.265	1.29	1.081,45	762	100

Sumber: BPS Kab. Purworejo, 2024

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023 sebesar 1,29. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo berada di angka positif.

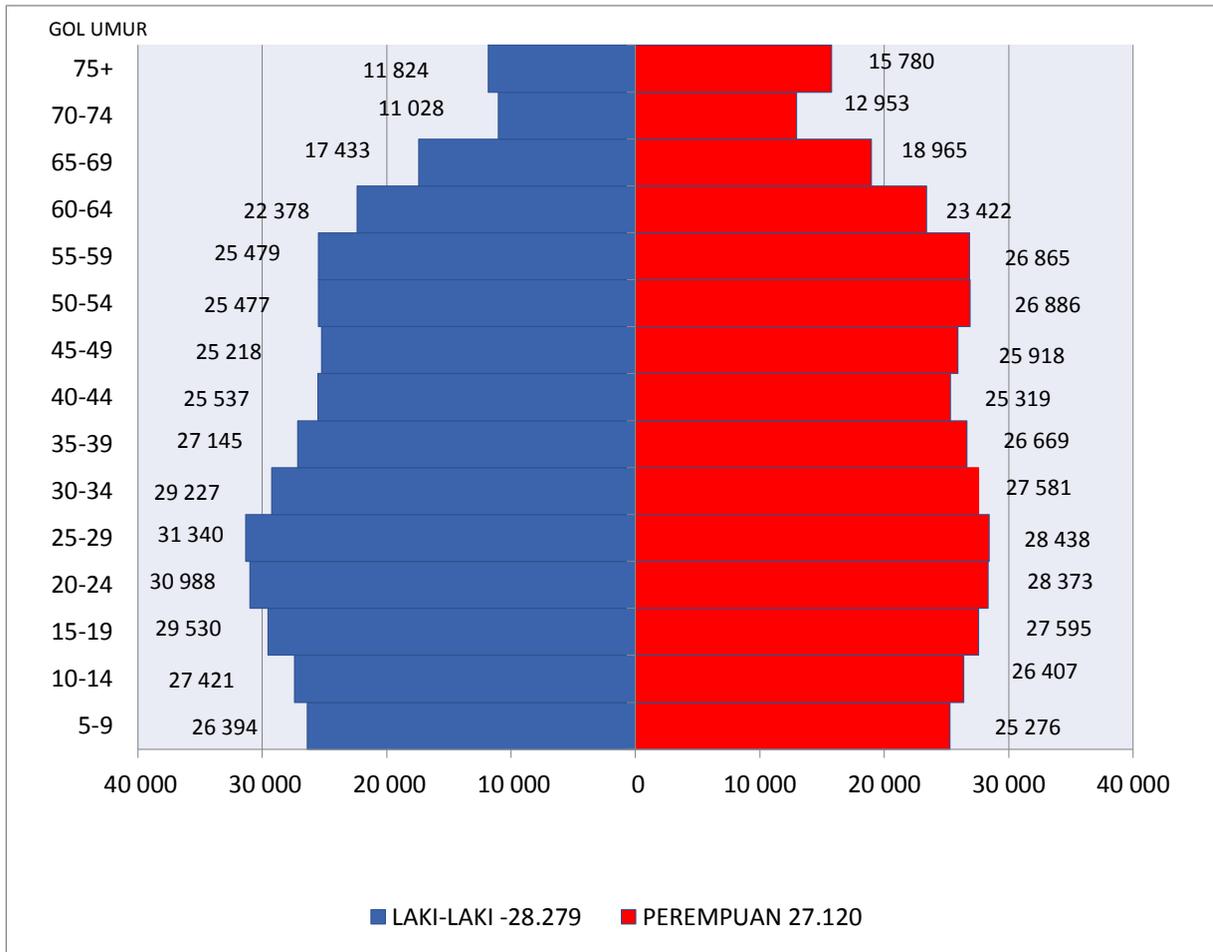
Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan wilayah tertentu. Besarnya angka kepadatan penduduk kasar kabupaten Purworejo pada tahun 2023 sebesar 762 jiwa/km². Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Purworejo (1.621 jiwa/km²), Kecamatan Kutoarjo (1.686 jiwa/km²), dan Kecamatan Bayan (1.220 jiwa/km²). Sementara itu, daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kaligesing, sebesar 432 jiwa/km². Kecamatan Bagelen juga memiliki kepadatan penduduk yang rendah sebesar 483 jiwa/km². Hal ini dimungkinkan terjadi karena dua kecamatan tersebut termasuk wilayah dengan kondisi geografis berupa pegunungan dengan lereng terjal serta memiliki kawasan hutan yang cukup luas.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita suatu wilayah pada waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya pria per 100 wanita. Dilihat dari nilai ratio jenis kelamin di 16 kecamatan ada pula kecamatan mempunyai nilai beragam yang artinya terdapat kecamatan yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, namun juga terdapat kecamatan yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

1.3.4.2 Struktur Penduduk

Piramida penduduk adalah grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin dan daerah suatu penduduk. Pada tahun 2023 ditunjukkan pada grafik, Kabupaten Purworejo sedang berada dalam bonus demografi yang berarti penduduk usia produktif lebih dominan.

Gambar 1. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Struktur penduduk di suatu wilayah juga dapat dilihat melalui kelompok usia. Jumlah penduduk menurut usia di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023 tersaji pada tabel berikut. Penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan usia tahun 2015-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023

Kelompok Umur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Usia 0-4	6,85	7,39	7,04	6,92	6,76	6,70	6,67	6,59	7,03
Usia 5-9	8,45	7,81	7,79	7,65	7,54	6,74	6,71	6,63	6,55
Usia 10-14	8,92	8,72	8,21	8,19	8,07	7,21	7,18	7,07	6,83
Usia 15-19	7,68	7,65	8,03	7,89	7,79	7,50	7,46	7,35	7,25
Usia 20-24	5,08	5,41	5,95	6,06	6,01	7,64	7,61	7,44	7,53
Usia 25-29	6,16	5,77	5,27	5,39	5,34	7,34	7,30	7,20	7,58
Usia 30-34	6,67	6,54	5,67	5,54	5,47	7,18	7,14	7,07	7,21
Usia 35-39	5,94	5,84	6,54	6,40	6,30	6,63	6,60	6,57	6,83
Usia 40-44	7,48	7,06	7,47	7,39	7,34	6,67	6,64	6,61	6,45
Usia 45-49	7,93	8,30	7,77	7,64	7,65	6,76	6,73	6,76	6,49
Usia 50-54	7,51	7,03	7,37	7,34	7,42	7,12	7,09	7,12	6,64
Usia 55-59	5,63	6,33	6,20	6,33	6,56	6,63	6,60	6,71	6,64
Usia 60-64	4,93	5,26	4,66	4,85	5,02	5,68	5,66	5,78	5,81

Kelompok Umur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Usia 65-69	3,14	3,12	4,04	4,22	4,40	4,30	4,28	4,42	4,62
Usia 70-74	3,36	3,10	3,27	3,33	3,40	2,69	2,67	2,83	3,04
Usia 75+	4,27	4,67	4,70	4,85	4,93	3,69	3,67	3,85	3,50

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024,

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata persentase penduduk terbanyak pada rentang usia 10-14 tahun. Sementara rata-rata persentase yang paling sedikit adalah penduduk yang berusia 70-74 tahun. Pada tabel menunjukkan bahwa mayoritas penduduk produktif lebih banyak dari penduduk berusia non produktif.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Purworejo tahun 2015-2023 dapat diamati pada tabel di atas. Kabupaten Purworejo Dalam Angka tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Kabupaten Purworejo memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,43% atau sebanyak 539.385 jiwa. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2023 adalah 46,14% yang artinya 100 penduduk usia produktif rata-rata menanggung 46-47 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65 keatas). Hal ini menunjukkan kondisi bonus demografi, yakni jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada penduduk non produktif.

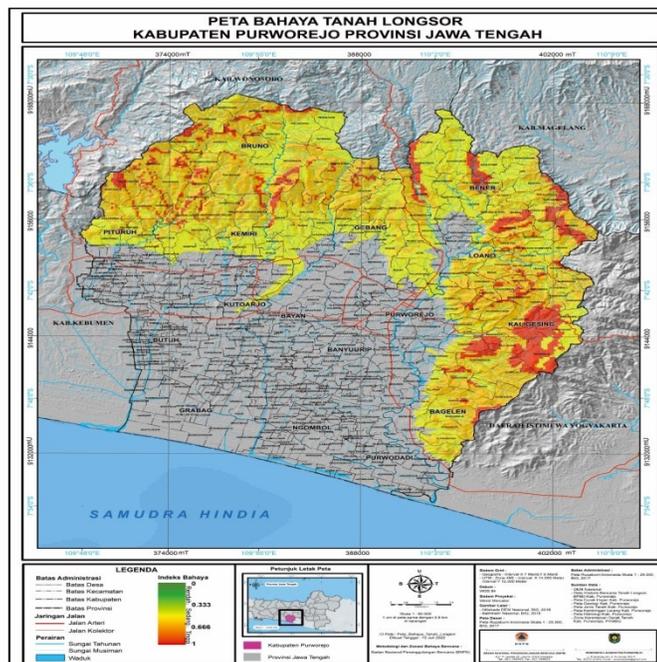
1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Berdasarkan RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 di wilayah Kabupaten Purworejo terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana alam yang paling sering terjadi sepanjang tahun, yaitu kawasan rawan bencana 31 tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana gelombang pasang, dan kawasan rawan bencana kekeringan.

1.3.5.1 Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang mudah bergerak. Pada kawasan ini tertutup bagi permukiman, persawahan, pertanian tanaman semusim, kolam ikan, dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan. Permukiman yang terletak di kawasan ini perlu segera dipindahkan ke tempat lain secara terencana. Perlu diupayakan adanya usaha-usaha untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Di Kabupaten Purworejo terdapat banyak lokasi yang rawan tanah longsor. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi fisik daerah. Sebaran kawasan yang rawan tanah longsor antara lain di Kecamatan Loano, Kecamatan Bruno, Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Pituruh, dan Kecamatan Kemiri.

Gambar 1. 5 Peta Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo



Sumber: BPBD Purworejo

1.3.5.2 Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Lokasi kawasan rawan banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Pituruh.

Gambar 1. 6 Peta Daerah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Purworejo



Sumber: Dokumen PRB.

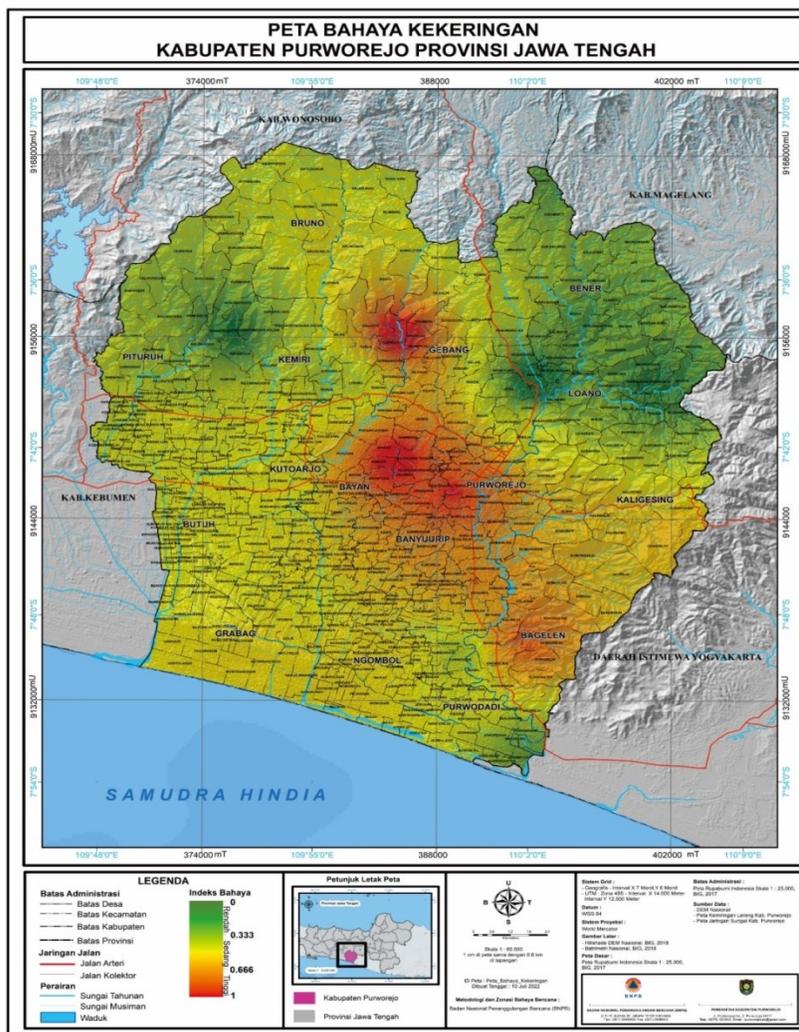
1.3.5.3 Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Purworejo ada 2 (dua) macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung control point. Sedangkan kekeringan pada daerah permukiman penduduk ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air bersih/minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahalnnya biaya memperoleh air bersih.

Kawasan rawan bencana kekeringan secara umum tersebar merata hampir di seluruh kecamatan. Kawasan sangat kering 34 tersebar di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bruno, Kecamatan Pituruh,

Kecamatan Kemiri, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan Bayan. Sementara kawasan dengan tingkat kekeringan sedang berada di Kecamatan Bruno.

Gambar 1. 7 Peta Daerah Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Purworejo



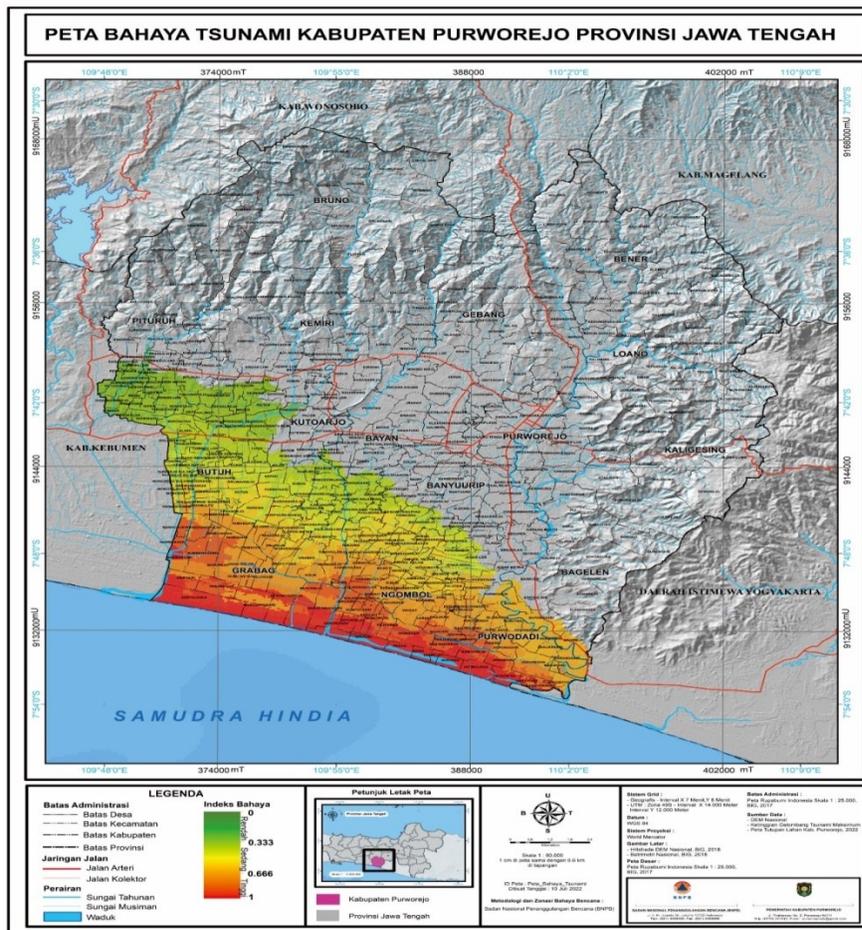
Sumber: BPBD PURWOREJO

1.3.5.4 Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Kawasan rawan bencana tsunami adalah tempat-tempat yang berpotensi terkena gelombang pasang laut dengan periode yang panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari bawah laut yang berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau longsor tanah. Tsunami mempunyai kecepatan yang berbanding lurus dengan kedalaman laut, sehingga semakin dalam laut maka kecepatan tsunami semakin besar. Selama perjalanan dari tengah laut menuju pantai kecepatan semakin berkurang karena gesekan dengan dasar laut yang semakin dangkal, akibatnya tinggi gelombang pantai menjadi semakin besar karena adanya penumpukan masa air akibat dari penurunan kecepatan. Gelombang yang berkecepatan tinggi ini dapat menghancurkan kehidupan di daerah pantai dan kembalinya air ke laut setelah puncak gelombang bisa menyeret segala sesuatu ke

laut. Lokasi kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Purworejo terletak di bagian Selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Purwodadi.

Gambar 1. 8 Peta Daerah Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Purworejo



Sumber: BPBD KABUPATEN PURWOREJO

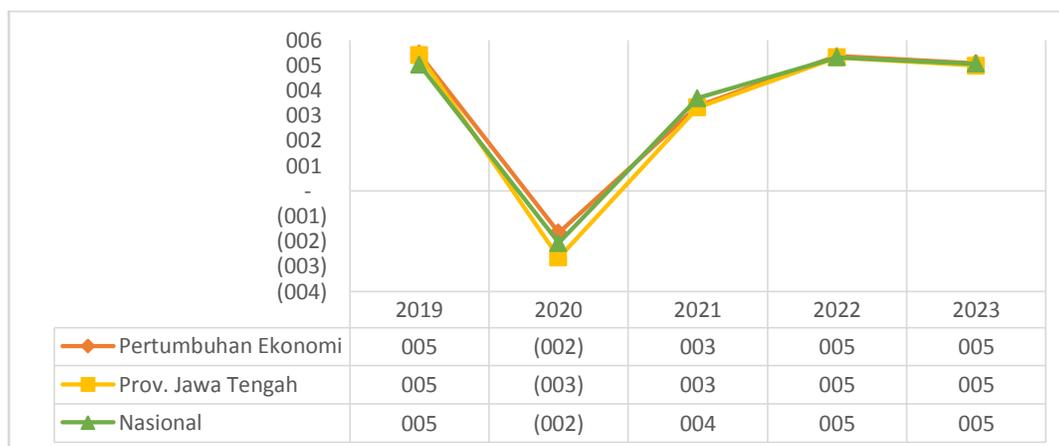
1.4 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN PEREKONOMIAN

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan.

1.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2023, Kabupaten Purworejo memiliki angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%, berada di atas Provinsi Jawa Tengah (4,98%) dan Indonesia (5,05%). Angka ini melambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yaitu menurun sebesar 0,29%. Lebih lanjut, kondisi pertumbuhan ekonomi ini dapat diamati pada gambar berikut.

Gambar 1. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesian Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Analisis PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan daerah serta evaluasi hasil pembangunan. PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Purworejo pada tahun 2019–2023 tertinggi terdapat di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sebesar 2.908,97 miliar rupiah pada tahun 2023 disusul Lapangan Usaha Industri Pengolahan, sebesar 2.693,35 miliar rupiah. Sedangkan capaian terendah pada tahun 2023 terdapat pada Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 10,34 miliar rupiah. Lebih lanjut, kondisi ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 1.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.757,01	2.756,84	2.764,46	2.835,78	2.908,97
B	Pertambangan dan Penggalian	92,05	94,40	99,73	102,10	102,06
C	Industri Pengolahan	2.374,86	2.388,46	2.476,35	2.562,41	2.693,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,35	12,56	13,14	14,41	15,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,07	9,27	9,76	10,25	10,34
F	Konstruksi	1.189,05	1.145,04	1.245,16	1.293,72	1.360,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.834,97	1.754,95	1.870,04	1.917,79	2.000,76
H	Transportasi dan Pergudangan	821,83	600,96	619,78	971,94	1.051,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	311,22	296,15	311,02	350,80	385,05
J	Informasi dan Komunikasi	990,78	1.132,62	1.200,28	1.212,34	1.313,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	441,85	450,45	462,38	470,57	481,87
L	Real Estate	304,57	303,68	310,86	325,16	343,45
M, N	Jasa Perusahaan	42,71	39,66	40,66	42,48	44,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	509,57	502,21	494,85	498,89	521,17

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
	Wajib					
P	Jasa Pendidikan	1.081,66	1.079,53	1.080,61	1.090,61	1.150,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228,95	248,31	248,83	251,62	264,42
R,S, T,U	Jasa lainnya	350,84	323,17	325,56	349,70	377,75
Produk Domestik Regional Bruto		13.353,34	13.138,29	13.573,47	14.300,56	15.025,91

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahunnya. Selaras dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi lapangan usaha tertinggi tahun 2023 atas dasar harga berlaku, sebesar 5.002,45 miliar rupiah disusul lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 4.593,66 miliar rupiah. Di Kabupaten Purworejo selama tahun 2019-2023, lapangan usaha yang menyumbang PDRB atas dasar harga berlaku terendah ialah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yaitu sebesar 12,93 miliar rupiah. Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 1. 6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.177,03	4.260,28	4.359,33	4.650,88	5.002,45
B	Pertambangan dan Penggalian	145,60	152,71	163,15	172,99	177,75
C	Industri Pengolahan	3.541,30	3.645,20	3.881,47	4.190,37	4.593,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,60	14,77	15,37	16,94	18,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,32	11,15	11,95	12,70	12,93
F	Konstruksi	1.696,26	1.639,83	1.843,62	2.011,68	2.181,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.353,50	2.277,07	2.461,86	2.623,30	2.832,19
H	Transportasi dan Pergudangan	979,85	740,92	788,02	1.307,36	1.532,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	400,11	385,48	412,51	472,21	523,85
J	Informasi dan Komunikasi	1.018,13	1.166,35	1.236,34	1.248,88	1.353,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	663,55	676,81	723,07	785,59	822,59
L	Real Estate	375,01	376,85	389,31	412,03	437,25
M,N	Jasa Perusahaan	61,57	58,26	60,35	65,11	70,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	727,06	726,51	710,02	738,18	786,89
P	Jasa Pendidikan	1.727,23	1.740,64	1.761,87	1.804,99	1.927,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	317,05	353,86	357,97	365,62	391,47
R,S, T,U	Jasa lainnya	449,19	419,79	426,53	473,71	522,67
Produk Domestik Regional Bruto		18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.352,54	23.188,03

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki laju pertumbuhan tertinggi (Atas Dasar Harga Konstan 2010), yaitu sebesar 56,82% di tahun 2022 namun menurun drastis menjadi 8,23% pada tahun 2023. Sementara itu, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian laju pertumbuhannya minus sebesar 0,04% di tahun 2023. Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 1. 7 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (%)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,85	-0,01	0,28	2,58	2,58
B	Pertambangan dan Penggalian	6,72	2,55	5,64	2,38	-0,04
C	Industri Pengolahan	6,10	0,57	3,68	3,48	5,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	1,75	4,59	9,65	5,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,16	2,26	5,30	4,99	0,88
F	Konstruksi	5,70	-3,70	8,74	3,90	5,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,22	-4,36	6,56	2,55	4,33
H	Transportasi dan Pergudangan	7,96	-26,88	3,13	56,82	8,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,70	-4,84	5,02	12,79	9,77
J	Informasi dan Komunikasi	10,76	14,32	5,97	1,01	8,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,13	1,95	2,65	1,77	2,4
L	Real Estate	5,51	-0,29	2,36	4,60	5,62
M,N	Jasa Perusahaan	9,62	-7,13	2,52	4,47	4,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	-1,44	-1,47	0,82	4,46
P	Jasa Pendidikan	7,56	-0,20	0,10	0,92	5,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,93	8,46	0,21	1,12	5,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,02	-7,89	0,74	7,41	8,02
Produk Domestik Regional Bruto		5,33	5,44	3,31	5,36	5,07

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Terdapat tiga lapangan usaha yang pertumbuhannya ditargetkan, yaitu PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sektor Industri Pengolahan. Dalam kurun lima tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sempat mengalami peningkatan di tahun 2020 (+1,74%), namun kembali menurun di tahun 2021 (-0,56%) dan meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,58%. Penurunan terbesar terjadi pada Sektor Transportasi dan Pergudangan di mana laju pertumbuhannya pada tahun 2022 adalah sebesar 56,82% dan menurun drastis pada tahun 2023 menjadi sebesar 8,23%.

Dilihat dari distribusinya, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menyumbang PDRB (atas dasar harga berlaku) paling rendah (0,06%) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha ini tidak dapat menjadi sektor unggulan untuk

dikembangkan di Kabupaten Purworejo. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 1. 8 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (%)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
I	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,39	22,85	22,24	21,78	21,57
B	Pertambangan dan Penggalian	0,78	0,82	0,83	0,81	0,77
C	Industri Pengolahan	18,98	19,55	19,80	19,63	19,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	9,09	8,79	9,40	9,42	9,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,61	12,21	12,56	12,29	12,21
H	Transportasi dan Pergudangan	5,25	3,97	4,02	6,12	6,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,14	2,07	2,10	2,26	2,26
J	Informasi dan Komunikasi	5,46	6,26	6,31	5,85	5,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,56	3,63	3,69	3,68	3,55
L	Real Estate	2,01	2,02	1,99	1,93	1,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,31	0,31	0,30	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,90	3,90	3,62	3,46	3,39
P	Jasa Pendidikan	9,26	9,33	8,99	8,45	8,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,70	1,90	1,83	1,71	1,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,41	2,25	2,18	2,22	2,25
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Perkembangan perekonomian Kabupaten Purworejo terus mengalami perubahan seiring perkembangan aktifitas perekonomian wilayah dan regional yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dari kinerja perekonomian Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2019- 2023. Perkembangan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADH Berlaku) dan atas dasar harga konstan (ADH Konstan), serta tingkat pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. 9 PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Jenis Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
I	2	3	4	5	6	7
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.615,04	14.602,69	15.133,40	16.593,37	18.282,49
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	379,79	378,99	395,55	435,73	474,44
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.990,77	1.895,47	1.951,49	1.971,01	2.082,67
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.201,12	4.864,59	5.275,30	5.633,87	5.962,79
E	Perubahan Inventori	216,28	244,28	223,35	284,56	331,70
F	Ekspor Barang dan Jasa	-3.745,62	-3.339,53	-3.376,37	-3.569,99	-3.946,07
Produk Domestik Regional Bruto		18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.349,54	23.188,03

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

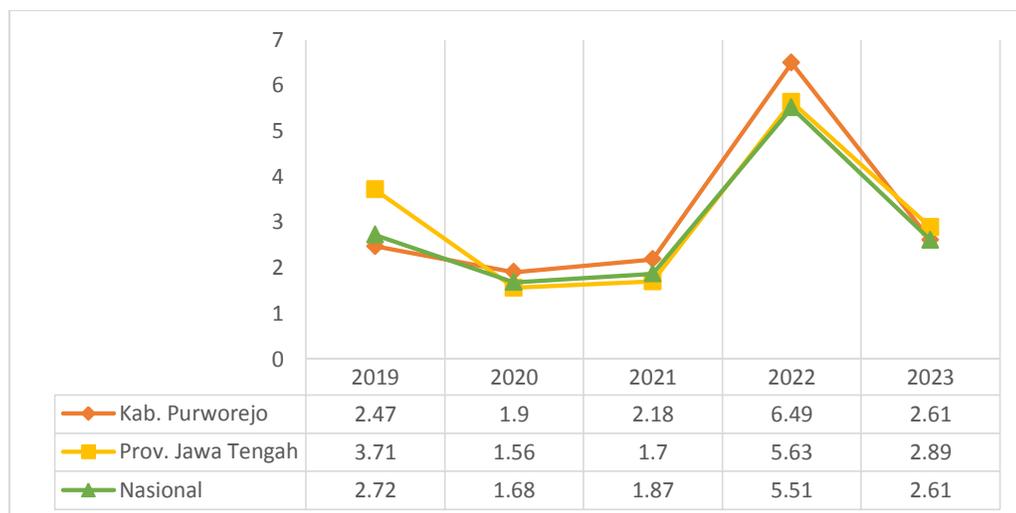
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

1.4.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi. Indikator ini menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu daerah, disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas pasar berlebih yang memicu aksi konsumsi atau spekulasi, atau adanya hambatan dalam distribusi dan suplai barang. Dalam roda perekonomian salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah laju inflasi karena inflasi akan berimplikasi pada hampir semua elemen di dalam sistem ekonomi.

Pada tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Purworejo. Perkembangan inflasi selanjutnya hanya dapat ditunjukkan di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Purwokerto merupakan daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo. Pada gambar di bawah ini dapat diamati fluktuasi inflasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia dalam kurun waktu 2019 – 2023.

Gambar 1. 10 Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan capaian terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,90 dan meningkat tajam pada tahun 2022 sebesar 6,49 senada dengan capaian inflasi di level Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi peningkatan inflasi pada tahun 2022 secara umum disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan supply pangan, dan kebijakan penyesuaian harga BBM. Kondisi ini juga disebabkan karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya perekonomian pasca pandemi Covid-19.

1.4.3 Kemiskinan

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten di sekitarnya dapat diamati pada tabel berikut.

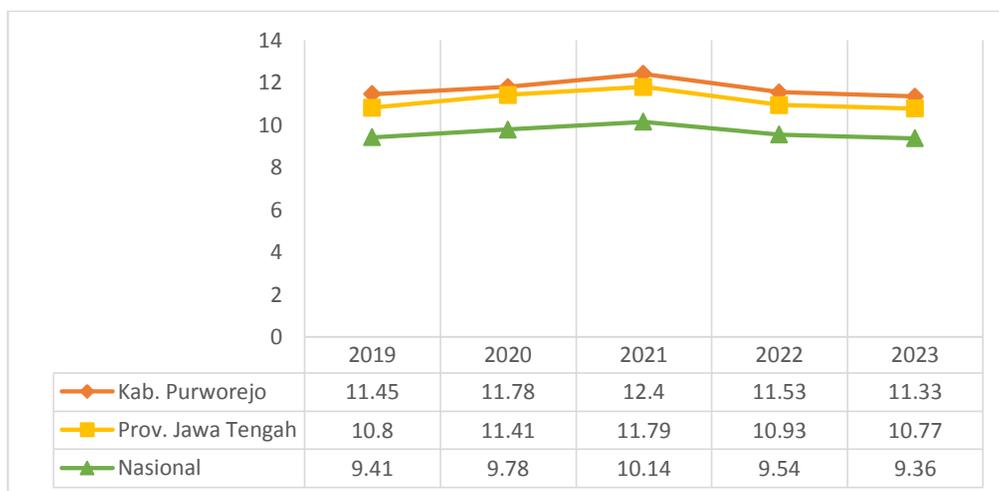
Tabel 1. 10 Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023

Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7
Kab. Purworejo	345.458	364.289	376.127	393.731	427.622
Kab. Kebumen	362.847	380.557	390.599	416.004	451.678
Kab. Wonosobo	340.827	362.683	373.474	399.180	425.105
Kab. Magelang	325.921	342.430	353.608	377.497	411.129
Kab. Kulon Progo	333.781	353.807	360.202	381.666	416.870
Prov. Jawa Tengah	381.873	395.407	409.193	464.879	477.580
Indonesia	438.448	454.652	472.525	535.547	550.458

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, Kabupaten Purworejo memiliki garis kemiskinan relatif lebih tinggi, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia. Tingkat kemiskinan menggambarkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Baik di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, maupun Indonesia, sejak tahun 2019 hingga 2021, kemiskinan cenderung mengalami peningkatan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19. Namun kondisi ini telah berhasil diturunkan pada tahun 2022 dan terus menurun hingga mencapai kondisi terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 11,33. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia selama kurun waktu 2019 – 2023 ditunjukkan pada di bawah ini.

Gambar 1. 11 Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019 – 2023

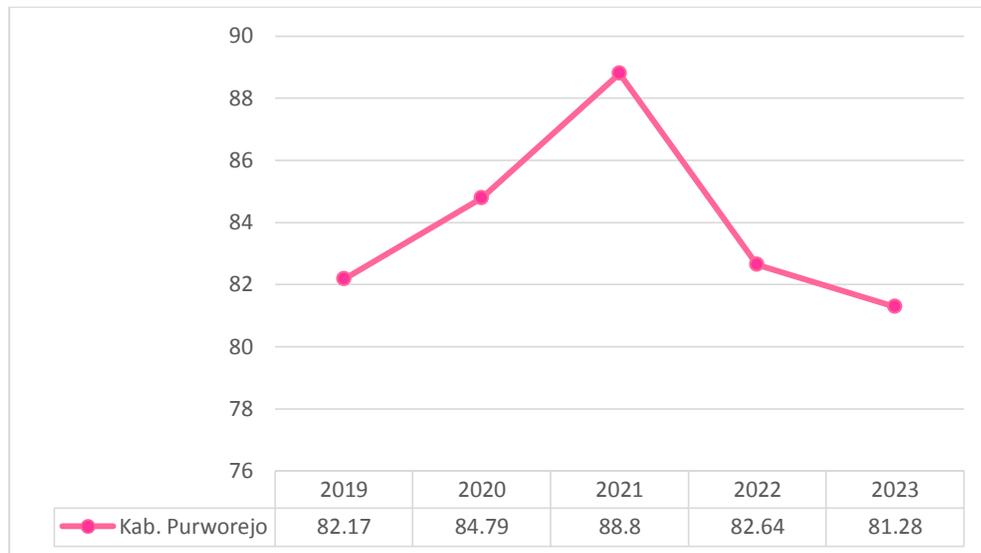


Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Secara umum, angka kemiskinan Purworejo dalam lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dari kondisi di tingkat provinsi dan nasional. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 1.2.1* dan 10.1.1 (a), tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih berada di atas target nasional, yaitu menurun menjadi 7-8%. Masih besarnya gap antara tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo dan nasional tentunya membuat kemiskinan menjadi sebuah isu besar yang perlu diselesaikan bersama serta membutuhkan peran berbagai pihak untuk saling bersinergi dalam pengentasannya.

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 – 2023. Dari perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo, dapat diukur seberapa besar penduduk miskin Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. Pada bulan Maret 2023 secara persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Purworejo mengalami penurunan yaitu dari 11,53 pada bulan Maret 2022 menjadi 11,33 pada bulan Maret 2023, secara jumlah berkurang sebanyak 1,36 ribu orang yaitu dari 82,64 ribu orang menjadi 81,28 ribu orang.

Gambar 1. 12 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan pemerintah harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purworejo dan daerah di sekitarnya, serta Jawa Tengah, dan Indonesia dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 1. 11 Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023

Kedalaman Kemiskinan (%)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	0,84	0,98	1,36	1,31	1,78
Kab. Kebumen	2,58	2,62	3,24	3,41	2,89
Kab. Wonosobo	2,44	2,42	2,75	3,18	2,60
Kab. Magelang	0,98	1,23	1,63	1,66	1,73
Kab. Kulon Progo	2,72	3,32	3,01	2,32	2,54
Prov. Jawa Tengah	1,53	1,72	1,91	1,77	1,75
Indonesia	1,55	1,61	1,71	1,56	1,53

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pada rentang tahun 2019-2023 seperti halnya angka kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan secara umum cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Di tahun terakhir, Kabupaten Purworejo memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan cenderung lebih rendah dibandingkan daerah di sekitarnya, meskipun masih berada di atas Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, yakni 1,78%. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan yakni 0,43% yang dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 12 Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023

Keparahan Kemiskinan (%)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	0,10	0,12	0,28	0,24	0,43
Kab. Kebumen	0,65	0,55	0,88	1,02	0,75
Kab. Wonosobo	0,46	0,47	0,65	0,86	0,63
Kab. Magelang	0,17	0,20	0,35	0,41	0,41
Kab. Kulon Progo	0,61	0,86	0,75	0,56	0,61
Prov. Jawa Tengah	0,30	0,34	0,45	0,42	0,42
Indonesia	0,37	0,38	0,42	0,38	0,38

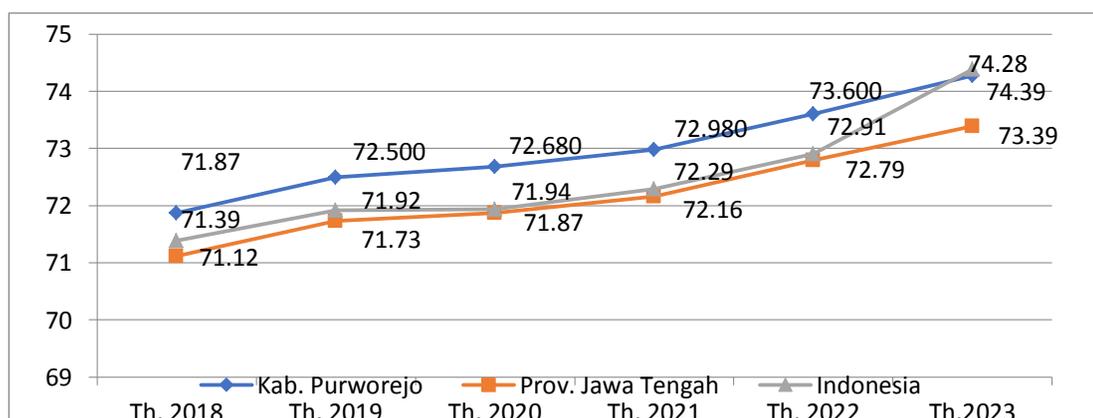
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Kondisi di tahun terakhir ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Purworejo, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan serta ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung lebih rendah daripada daerah di sekitarnya, namun masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah serta di tingkat nasional.

1.4.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur umur panjang dan hidup sehat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan tingkat pendidikan, sementara pengeluaran per kapita untuk mengukur standar hidup layak.

Gambar 1. 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2018 - 2023



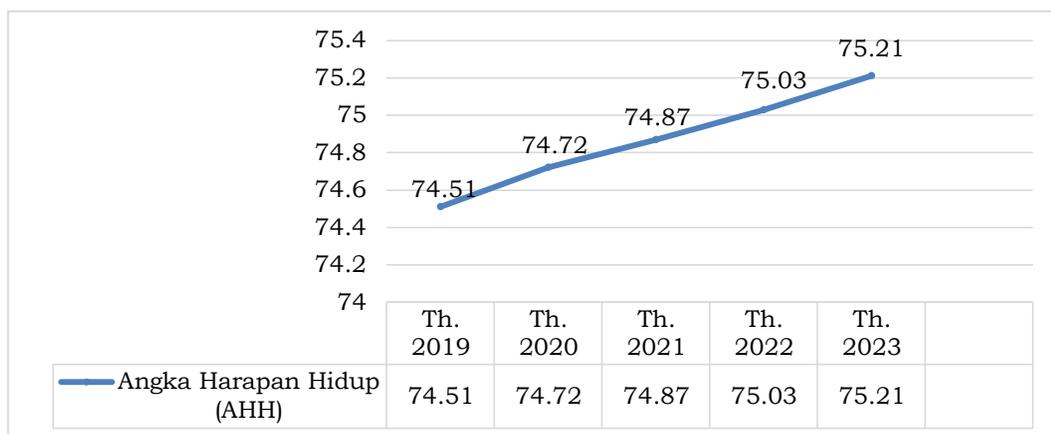
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024)

Gambar di atas menunjukkan IPM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia dalam kurun waktu 2018 hingga 2023. Nilai IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah 74,35 meningkat dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 73,67. Angka ini juga lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 73,39 namun dibawah Nasional tahun 2023 sebesar 74,39.

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Kabupaten Purworejo selalu mengalami kenaikan AHH dalam kurun waktu 2019 – 2023. Angka ini dapat menjadi cerminan upaya Pemkab Purworejo dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Data terakhir menunjukkan AHH Kabupaten Purworejo mencapai 75,21 pada tahun 2023. Perkembangan 5 tahun terakhir menunjukkan angka AHH di tahun 2020 terjadi kenaikan paling tinggi (0,21), meskipun terjadi pandemi Covid-19. Hal ini dapat diamati pada gambar berikut.

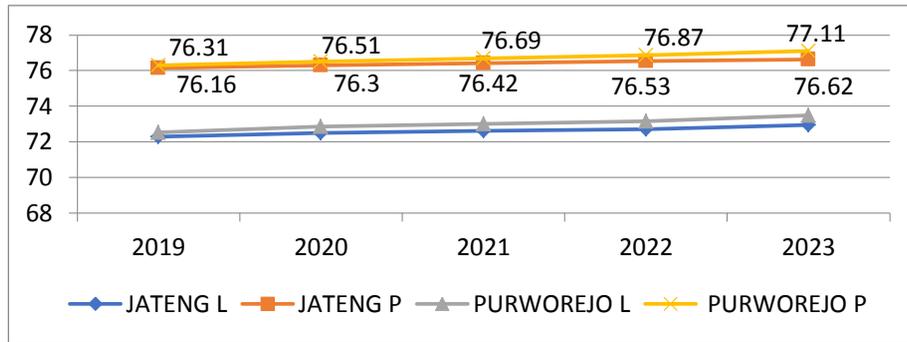
Gambar 1. 14 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data pilah gender, baik di Kabupaten Purworejo maupun di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup perempuan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup laki-laki. Sedangkan angka harapan hidup baik perempuan maupun laki-laki di Kabupaten Purworejo memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

Gambar 1. 15 Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

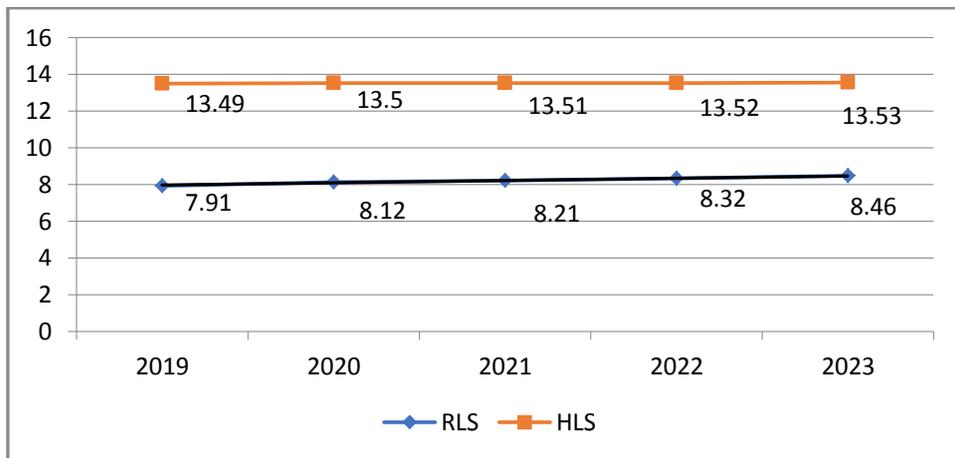


Sumber: BPS Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2024

b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kondisi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 – 2023 dapat diamati pada gambar berikut.

Gambar 1. 16 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023

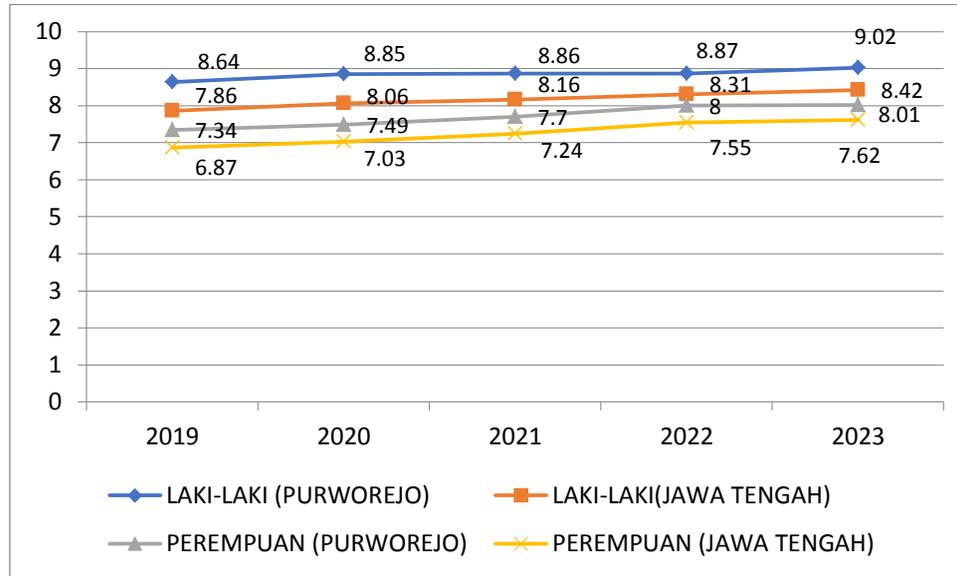


Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun terakhir (2023) RLS menunjukkan angka 8,46 sementara HLS menunjukkan angka 13,53. Angka RLS jika dikaitkan dengan capaian indikator TPB nomor 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun, angka RLS di Kabupaten Purworejo masih di bawah target nasional yaitu meningkat menjadi 8,8. Sementara tingginya HLS di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa diharapkan pada masa mendatang, anak dapat menempuh pendidikan setidaknya Diploma I atau Diploma III.

Sedangkan berdasarkan pilah gender, angka RLS laki-laki memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan angka RLS perempuan baik di Kabupaten Purworejo maupun di Provinsi Jawa Tengah. Apabila dilihat secara keseluruhan. Sedangkan nilai RLS Kabupaten Purworejo baik laki-laki maupun perempuan berada di atas angka RLS Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijabarkan dalam grafik berikut.

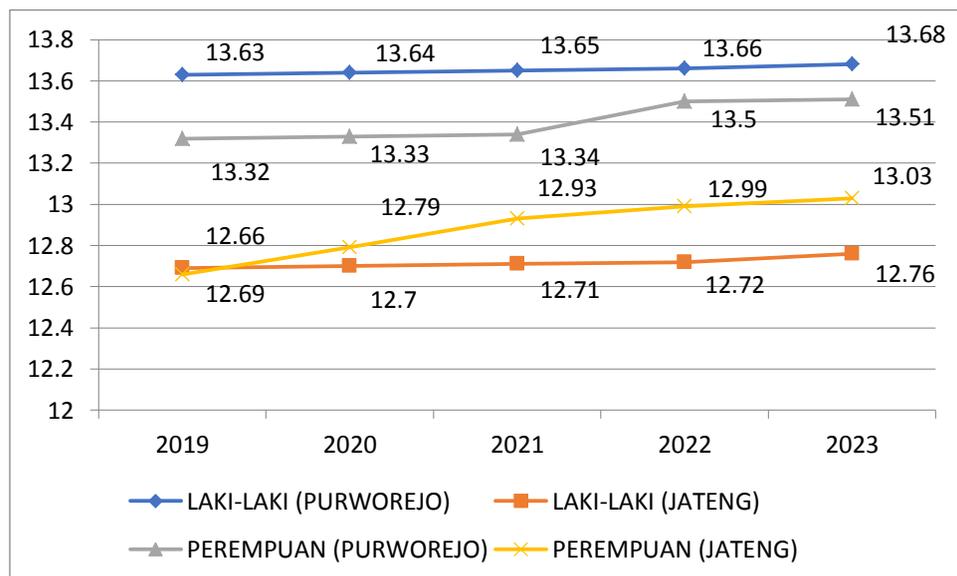
Gambar 1. 17 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Sebagaimana capaian angka RLS, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) laki-laki di Kabupaten Purworejo memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan angka HLS perempuan. Sedangkan secara keseluruhan, angka HLS baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Purworejo memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan dengan angka HLS di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. 18 Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

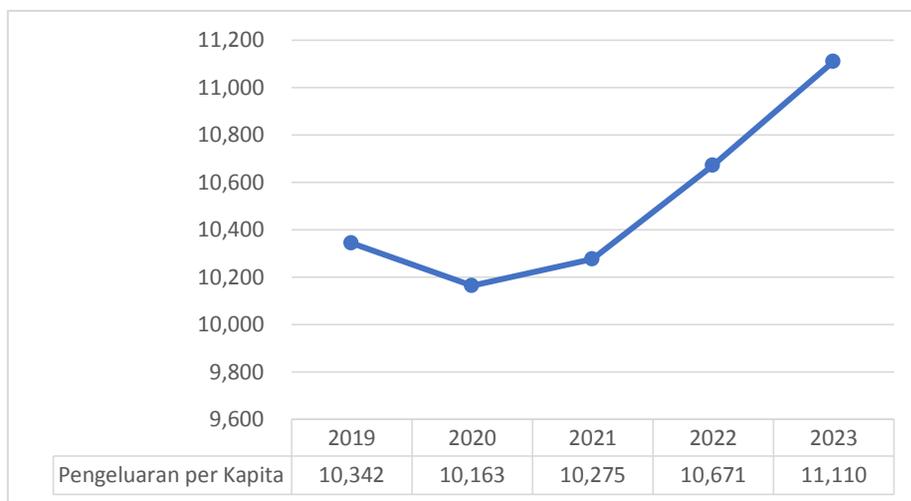


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

c. Pengeluaran Per Kapita

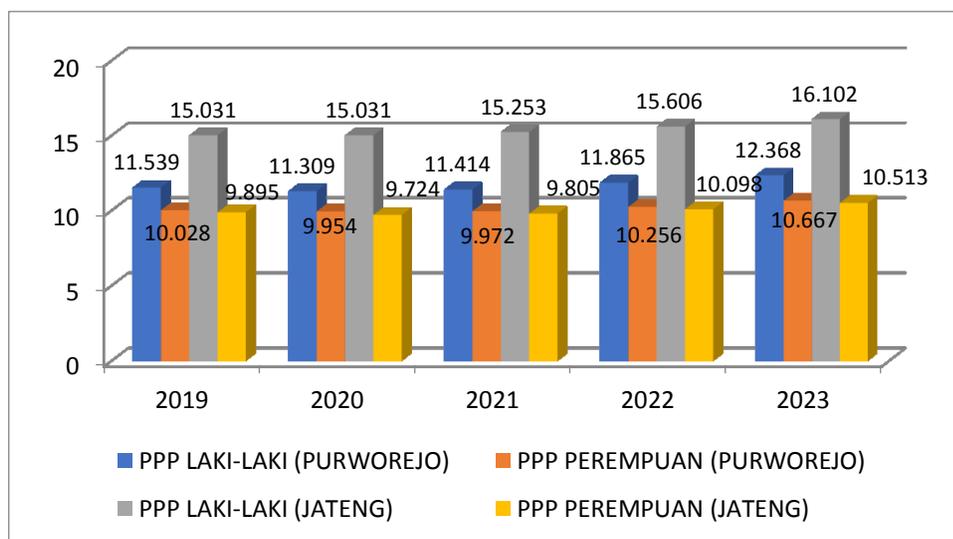
Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seorang anggota rumah tangga selama satu tahun. Pengeluaran per kapita di Kabupaten Purworejo cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir meskipun sempat menurun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Namun kondisi ini kembali meningkat dan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp 11.110.000. Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada gambar berikut.

Gambar 1. 19 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (ribu rupiah/orang/tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Gambar 1. 20 Pengeluaran Per Kapita Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (ribu rupiah/orang/tahun)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan gender, pengeluaran per kapita laki-laki memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita perempuan baik di Provinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Purworejo. Sedangkan pengeluaran per kapita pada jenis kelamin perempuan di Kabupaten Purworejo memiliki nilai yang lebih

tinggi dibandingkan dengan pengeluaran per kapita perempuan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditampilkan pada grafik di atas.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat. Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terindegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Purworejo 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2. 1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini;	21.617	21.385	98,93%	18.100.395.920	17.714.621.488	97,87
2	Pendidikan Dasar;	105.725	92.772	87,75%	166.572.058.504	159.956.210.203	96,03
3	Pendidikan Kesetaraan;	691	609	88,13%	1.625.433.036	1.385.400.495	85,23
	total				186.297.887.460	179.056.232.186	93,04

2.1.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2. 2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			ANGGARAN (RP.000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kesehatan ibu hamil	7524	7401	100	2.373.262.218	1.919.032.716	80,86
2	Kesehatan ibu bersalin	7524	7401	100	194.404.600	82.233.600	42,30
3	Kesehatan bayi baru lahir	7507	7507	100	116.424.412	62.479.100	53,66
4	Kesehatan balita	42875	42875	100	701.995.179	573.591.720	81,71
5	Kesehatan pada usia pendidikan dasar	99744	99744	100	637.016.912	549.354.000	86,24
6	Kesehatan usia produktif	290080	290080	100	933.715.337	833.510.100	89,27
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	102862	102862	100	823.595.273	771.526.000	93,68
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	46663	46663	100	96.042.958	83.618.800	87,06
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	9327	9327	100	746.279.500	718.319,799	96,25

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR			ANGGARAN (RP.000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Melitus						
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	3880	3880	100	231.684.255	180.979.200	78,11
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	8703	8703	100	548.432.546	242.943.100	44,30
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	9757	9757	100	295.015.082	235.066.500	79,68

2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2. 3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu APBN, APBD, dan Dana Lain	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	14.852 orang atau 3.713 SR	15.392 orang atau 3.848 SR	103,64	15.300.557.000	14.361.355.297	93,86
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	3.020 orang atau 755 Rumah Tangga	3.032 orang atau 758 Rumah Tangga	100,40	5.626.783.000	5.614.238.346	99,78

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2. 4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	25	25	100	1.307.004.000	1.236.152.540	94,58
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	5	5	100	184.000.000	184.000.000	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
	pemerintah daerah kabupaten/kota						

2.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Tabel 2. 5 Kondisi Capaian SPM Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2538	2538	100%	2.445.986.088	2.415.300.823	98,75 %
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	26	26	100%	3.008.663.718	2.953.822.170	98,18 %
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	300	300	100%	44.197.700	43.191.800	97,72 %
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	262	262	100%	2.907.165.400	2.810.905.415	96,69 %
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	972	972	100%	1.263.463.055	1.230.045.416	97,36 %

2.1.6 Bidang Sosial

Tabel 2. 6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	291	291	100 %	234.576.800,-	151.272.884,-	64,48 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	50	50	100 %	381.746.245,-	379.746.245,-	99,47 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.	86	86	100 %	7.704.900,-	4.498.660,-	58,39 %

No	Jenis Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.	40	40	100 %	49.125.736,-	48.799.360,-	99,34 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah.	311	311	100 %	288.605.900,-	139.581.495,-	48,38 %

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Purworejo ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Kendala yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I INTERNAL			
1	Pendataan	Warga yang dipesantren tidak ikut ke data dalam siswa pendidikan formal	Pendataan menyeluruh
II EKSTERNAL			
1	Penduduk Usia Paud belum semua paud	Adanya pandemic covid 19 membuat masyarakat enggan mendaftarkan sekolah PAUD	Kerjasama dengan desa untuk sosialisasi pendidikan paud
2	Masih ada anak usia sekolah belum bersekolah	Warga yang berkebutuhan khusus tidak berani bersekolah	Sosialisasi Pendidikan Inklusi ke masyarakat

2.2.2 Bidang Kesehatan

Hambatan dan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut.

Tabel 2. 8 Permasalahan dan Alternatif Solusi Pelaksana Pelayanan SPM Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	Internal		
1	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan SPM sehingga beban kerja menjadi berat krn jumlah sasaran banyak (rasio) - SDM di puskesmas kebanyakan tugas rangkap - Belum semua SDM memiliki kompetensi sesuai standart 	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi pembagian kerja - Mengusulkan renbut SDM - Peningkatan Kapasitas SDM melalui orientasi dan pelatihan
2	Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan biaya belum mengacu pada sistem pembiayaan SPM (<i>costing</i> SPM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan penerapan <i>costing</i> SPM dalam perencanaan
3	Pemenuhan Kebutuhan mutu barang	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan mutu barang masih kurang dikarenakan sasaran yang sangat besar terutama buku raport Kesehatan dan buku pemantauan Kesehatan lansia 	<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi ke lintas sektor untuk pemenuhan mutu barang
4	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Perbedaan persepsi dalam penentuan sasaran SPM serta perhitungan pencapaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan surveylans data
5	Pelayanan SPM	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pelayanan belum seluruhnya secara masif dan intergrasi lintas program 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan cakupan pelayanan dengan sinergitas antar program - Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelayanan Kesehatan sesuai standar
II	Eksternal		
1	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Angka partisipasi masyarakat untuk mengakses pelayanan kurang - Adanya penolakan vaksinasi baik pada ibu hamil maupun bayi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelayanan Kesehatan sesuai standar - Koordinasi dengan lintas sektor terkait kehalalan vaksin
2	Lintas Sektor	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan lintas sektor dalam penggerakan masyarakat dan pemenuhan mutu layanan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Pemda dan lintas sektor untuk meningkatkan keterlibatan lintas sektor dalam penggerakan masyarakat dan pemenuhan mutu layanan.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh. Dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang pekerjaan umum, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diperlukan dapat dijelaskan menurut tabel berikut.

Tabel 2. 9 Permasalahan Dan Alternatif Solusi Pelaksana Pelayanan SPM Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1	Pengumpulan data	Banyaknya jumlah desa/kelurahan (494) menjadikan pendataan holistic banyaknya rumah, jumlah rumah tangga, sumber air baku, kapasitas intake, kapasitas produksi, idle capacity, jenis SPAM, dan jenis bangunan sanitasi yang dimiliki di Kab. Purworejo membutuhkan waktu lama dan melibatkan peran aktif desa.	Pembuatan sistem berbasis internet yang digunakan untuk input data pembangunan secara holistik. Dimana pemerintah desa berperan langsung dalam pengisian aplikasi
	Pengumpulan Data	Pendataan penerapan SPM secara lengkap dan detail baru dilaksanakan di tahun 2022 sehingga pengumpulan data air minum dan sanitasi untuk tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya sulit disajikan karena data yang ada kurang lengkap.	Perlu kerja sama dengan pihak pihak terkait yang mempunyai data-data air minum dan sanitasi lengkap di tahun sebelum 2022. Perlu penambahan personil dalam mengerjakan pendataan yang diperlukan dalam penerapan SPM terutama untuk air minum dan sanitasi.
2	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan aktual jumlah rumah/KK, jaringan perpipaan, bukan perpipaan, dan jumlah bangunan sanitasi harus selalu dapat dilakukan pembaruan secara berkala sehingga memerlukan waktu yang lama karena banyaknya desa di Kabupaten Purworejo dan memerlukan banyak data sekunder dari pihak terkait lainnya.	Penghitungan kebutuhan didasarkan pada data sekunder terbaru dari instansi pemerintah yang dapat dipercaya. Ketika aplikasi pengumpulan data siap, hasil data sekunder dan aplikasi dapat dikomparasikan untuk menghasilkan keakuratan data yang lebih baik
	Penghitungan Kebutuhan	Dalam tabel penghitungan kebutuhan terdapat data nama KK dan NIK tiap KK yang tentunya membutuhkan proses yang lama dan kerja sama dengan pihak terkait selama kurun waktu tertentu sehingga untuk pemanfaat air minum dan sanitasi di tahun sebelum 2022 tidak dapat diperoleh. Data NIK jika diupload dalam website spm bangsa menjadi sesuatu yang rawan akan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Pengumpulan data nama KK dan NIK di tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya tidak perlu ditampilkan maupun diupload dalam laporan penerapan SPM. Data NIK penerima layanan air minum dan sanitasi tahun 2022 dan 2023 juga tidak perlu diupload pada website spm bangsa.
3	Perencanaan dan Penganggaran	Anggaran yang ada (APBN, Provinsi, dan Kabupaten) belum dapat memenuhi kebutuhan penyediaan/ peningkatan sarana SPAM dan pengelolaan air limbah domestik untuk mencapai target 100% akses air minum dan sanitasi layak.	Optimalisasi segala sumber pedanaan baik dari pemerintah maupun CSR dalam pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi
4	Pelaksanaan	Data yang sulit didapatkan secara lengkap sehingga menghambat pembuatan laoporan SPM dan lampirannya.	

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
II	Eksternal		
5	Keakuratan data	Data sekunder belum dapat dipastikan tingkat keakuratannya terutama pada penghitungan jaringan perpipaan yang dihibahkan kepada KP-SPAMS karena sulitnya koordinasi kepada KP-SPAMS. Data terkait air minum bukan jaringan perpipaan juga sulit kita dapatkan data sekundernya.	Adanya koordinasi yang baik antara KP-SPAMS dan dinas, peningkatan kapasitas KP-SPAMS dalam pengelolaan data SR, dan bantuan pendanaan bagi KP-SPAMS untuk menunjang pendataan yang lebih baik.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2022, kendala yang dihadapi dan solusi yang diperlukan dapat dijelaskan menurut tabel berikut.

Tabel 2. 10 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1	Pengumpulan Data	Belum dilakukan penyusunan database jumlah rumah yang berada bukan pada peruntukannya, sedangkan pendataan rumah yang berada di kawasan rawan bencana baru sebagian kecamatan	Penganggaran segera untuk penyusunan database yang komprehensif sebagai dasar pelaksanaan SPM
2	Penghitungan Kebutuhan	Kebutuhan penanganan sudah dilaksanakan terhadap rumah korban bencana yang belum tertangani. Verifikasi telah dilakukan. Namun kejadian bencana selalu bertambah baru setiap tahunnya.	Perhitungan kebutuhan program tiap tahun harus didukung dengan update data berkala terhadap kejadian bencana.
3	Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran jika mengacu pada rencana aksi ideal tahunan. Tidak adanya anggaran untuk dana tak terduga bagi korban bencana baru mengingat Purworejo memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana tinggi di Jawa Tengah. 	Peningkatan alokasi anggaran SPM Perumahan rakyat sesuai rencana aksi. Menghindarkan anggaran SPM dari efisiensi/ refocusing.
4	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya koordinasi antar OPD, desa maupun masyarakat dalam pelaksanaan SPM perumahan rakyat Pengadaan lahan relokasi rumah korban bencana belum dapat dianggarkan hingga tahun ini 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi antar stakeholder pada tiap tahapan pelaksanaan SPM tiap tahunnya Pengadaan lahan baru oleh Pemda sebagai lokasi relokasi

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
II	Eksternal		
	Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terjalannya konsolidasi yang kuat antar OPD, desa maupun masyarakat dalam pendataan dan perencanaan SPM perumahan rakyat ke depan • Alokasi bantuan SPM antar pos anggaran tiap instansi terkait (pemda, swasta, LSM) belum terkoordinasi berdasarkan data terpadu. 	Memulai koordinasi lintas pihak guna membentuk kesepahaman, perencanaan terpadu dan pelaksanaan yang terkoordinir dengan baik demi terwujud penanganan korban bencana/relokasi yang cepat dan merata.

2.2.5 Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan SPM Trantibumlinmas terdapat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik Internal maupun Eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No.	Aspek	Permasalahan	Solusi
	a. Sub Urusan Trantibum		
1	Pengumpulan data	<p>Belum dilakukan penyusunan database jumlah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Perda dan Perkada; 2. Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada <p>dikarenakan dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah personil yang terbatas sehingga pada saat melaksanakan kegiatan/penegakan perda dan perkada belum sepenuhnya dapat melaksanakan pendataan/ mendata Jumlah Warga Negara dan Fasilitas Sosial Aset Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dilokasi Penegakan Perda dan Perkada, sehingga data yang diperoleh untuk mencukupi hal tersebut belum maksimal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memaksimalkan personil yang ada pada saat melaksanakan kegiatan/ penegakan perda dan perkada dikarenakan adanya regulasi terkait dengan belum diperbolehkannya untuk menambah/ merikrut tenaga; b. Perlu MoU dengan Dinas/ instansi terkait untuk identitas warga, juga terkait dengan aset-aset negara.
2	Penghitungan Kebutuhan	<p>Perhitungan Kebutuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum; 2. Penyusunan SOP; 3. Sarana dan Prasarana Satpol PP; 4. Pelayanan Dasar Warga Negara yang Terkena Dampak; <p>sudah dilaksanakan akan tetapi untuk Pelayanan Dasar Warga yang terkena dampak hingga saat ini belum ada aduan terkait dengan kerugian baik materil maupun pengobatan oleh warga</p>	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP

No.	Aspek	Permasalahan	Solusi
		negara akibat penegakan perda dan perkada.	
3	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan Sarpras dan Personil	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Sarpras penunjang kegiatan; b. Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP; c. Peningkatan alokasi anggaran SPM Sub Urusan Trantibum serta menghindarkan anggaran yang berkaiian dengan penunjang SPM dari efisiensi/ refokusing.
4	Pelaksanaan	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasaran dan pemenuhan personil dalam menunjang SPM sub urusan Trantibum	<ul style="list-style-type: none"> a. Memaksimalkan Sarparas dan personil yang ada; b. Pengadaan Sarpras penunjang kegiatan; c. Koordinasi terkait dengan penambahan personil penunjang kegiatan dengan BKPSDM.
b. dan Sub Urusan Kebakaran			
1	Pengumpulan data	Belum maksimal dalam melaksanakan penyusunan database jumlah Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran Kabupaten/Kota diakrenakan keterbatasan personil/ tenaga ahli yang membidangi terkait dengan pendataan dan investigasi kejadian kebakaran sehingga data yang diperoleh untuk mencukupi hal tersebut belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memaksimalkan personil yang ada pada saat melaksanakan kegiatan; b. Pengusulan Penambahan personil/ tenaga ahli yang membidangi terakit dengan pendataan dan investigasi kejadian kebakaran melalui seleksi ASN.
2	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan sudah dilaksanakan akan tetapi mekanisme dalam pengisian perhitungan pada form-form perhitungan kebutuhan tersebut belum dapat dipahami secara maksimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperhitungkan kebutuhan dan mengusulkan kepada TAPD; b. Mengusulkan agar dapat dilakukan sosialisasi mekanisme perhitungan pada form-form perhitungan kebutuhan tersebut.
3	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan Personil serta belum terpenuhinya jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam pemenuhan layanan Respon Time	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggadaan sarpras; b. Pembentukan Relawan Kebakaran; c. Sosialisasi dan simulasi Penanggulangan Kebakaran; d. Peningkatan alokasi anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran, serta menghindarkan anggaran yang berkaitan dengan penunjang SPM dari efisiensi/ refokusing;
4	Pelaksanaan	Belum optimalnya pemenuhan sarana prasaran dan pemenuhan personil dalam menunjang SPM sub urusan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> d. Memaksimalkan Sarparas dan personil yang ada; e. Pengadaan Sarpras penunjang kegiatan; f. Koordinasi terkait dengan penambahan personil penunjang kegiatan dengan BKPSDM.

Tabel 2. 12 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun	Kendala	Solusi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	2023	Internal 1. Kesulitan dalam merekap data warga di daerah rawan Bencana terutama menggunakan NIK 2. KRB yang sudah disusun belum mencantumkan daerah rawan bencana secara keseluruhan dan terperinci. Hanya berisi jumlah di setiap kecamatan dan tidak menyebutkan nama daerah/ desa	1. Koordinasi dengan Disdukcapil untuk mendapatkan data warga di daerah rawan bencana 2. Data dihasilkan dari pemaduan data daerah rawan bencana di KRB baru dan KRB lama
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2023	Internal: 1. Kesulitan dalam merekap data warga dan aparatur yang dilatih di daerah rawan Bencana terutama menggunakan NIK 2. Belum bisa menentukan daerah mana yang akan dilatih, karena KRB yang dibuat belum menyebutkan secara terperinci daerah rawan bencana hanya jumlah di setiap kecamatan	1. Koordinasi dengan Disdukcapil untuk mendapatkan data warga di daerah rawan bencana 2. Data daerah rawan bencana merupakan perpaduan data di KRB baru dan KRB lama
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2023	Internal: 1. Terdapat banyak data korban yang masuk belum benar dan masih berubah ubah 2. Dalam pemberian bantuan logistik tidak menyebutkan jumlah orang yang dibantu melainkan hanya paket 3. Mendata korban bencana tidak sampai ke NIK korban. Hanya sebatas nama, umur dan jenis kelamin	1. Koordinasi dengan pejabat wilayah (RT dan RW) 2. Asesmen dengan melibatkan penduduk setempat dan memvalidasi data kembali sebelum membuat laporan ke Pimpinan 3. Membuat SOP pemberian bantuan logistik 4. Pada saat asesmen, nama korban untuk ditulis sesuai KTP

2.2.6 Bidang Sosial

Kendala yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 13 Permasalahan dan Solusi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
		Pengampu SPM kesulitan menentukan kriteria penerima layanan dasar (PGOT diluar panti yang mendapatkan bantuan/ warga miskin)	Adanya sumber Data yang akurat.
		Pengampu SPM kurang memahami mutu layanan dasar	Diadakanya Sosialisasi Penyusunan SPM.
		Masih Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo.	Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo
		Kelompok Jabatan Fungsional khusus sesuai dengan Struktur Organisasi yang belum terisi.	Adanya tambahan Pegawai untuk mengisi formasi jabatan umum/ fungsional
		Kurangnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dalam Pelayanan Kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial.	Diadakanya Pelatihan bagi ASN/ personil yang menangani Kegiatan Pencapaian SPM.
II	Eksternal		
		Kurangnya Komunikasi dengan Instansi /Dinas lain dalam hal pencapaian SPM.	Menjalin komunikasi dengan Instansi/Dinas terkait
		Kurangnya Anggaran	Anggaran Tahun 2024 di tambah

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

3.1 SPM Pelayanan Dasar

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhannya layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun 3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	didik Peserta Kegiatan Didik Peserta

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Didik Peserta
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Didik Peserta
			6	Penyediaan pendidikan layanan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan Guru /pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk Meningkatkan kualitas Layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan Pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik tenaga dan kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan Tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan pemenuhan Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		pendidikan dan pelatihan Calon pengawas sekolah/ Lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
			1	Peningkatan kualifikasi dan Kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
2.	Program Pendidikan Dasar SPM	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs /Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampailulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/ MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/ Paket B)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik tenaga kependidikan dan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik tenaga kependidikan dan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/	Kegiatan
				Lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan Tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/ Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
3.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan pendidikan layanan di wilayah yang Ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/loka karya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi Bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan Jumlah pendidik dan Tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan Penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan Tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN		
1	2	3	4	5		
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan	
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ Lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas	
			1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan Tenaga kependidikan	
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)				

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Tabel 3. 2 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Kesehatan

No	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
2			Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang	
3			Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang	
4			Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang	
5			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	
6			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	
7			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	
8			Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	
9			Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	
10			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang	

No	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 3.3 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program pengelolaan Dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan Dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tariff air minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan pengawasan Terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
2.	Program pengelolaan Dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, Strategi dan teknis sistem Pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan system pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3	Pembangunan/penyediaan system pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan system pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan system pengelolaan air limbah domestic terpusat skala permukiman	
			6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Unit
			10	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M ² /hari
			11	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan system pengelolaan air limbah domestic terpusat skala permukiman	M ² /hari
			12	Pembangunan/penyediaan system pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasanana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 3. 4 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
			1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Tabel 3. 5 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan etentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
			6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban Umum	Unit
			8 Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
			1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan
			2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
			3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
			2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
			3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen
			4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
			5	Penguatan kapasitas kawasan Untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
			7	Penanganan pasca bencana kabupaten	
			8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
			9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
			11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
			12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan
			2	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen
			3	Pencarian, pertolongan dan Evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			4	Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			5	Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	Laporan
			6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi Penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
			6	Penanganan pasca bencana kabupaten	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			5	Standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
			6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen
			7	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
			10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
		Kegiatan inspeksi Peralatan proteksi kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
			2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau Mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia / penyelamatan dan evakuasi	Unit
			4	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Tabel 3. 6 Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Purworejo Bidang Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti social	1	Penyediaan permakanaan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan mental, spiritual, dan sosial fisik,	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Bencana Penanganan	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana Alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3. 7 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pendidikan Anak Usia Dini			21.000	21.000			21.156.253.653		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	21.000	21.000			20.240.920.260		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah	%	83,62			88,00	88,46	7.405.589.977						88,00	88,46	6.556.861.200			
2	Angka partisipasi murni	%	60,79			60,00	60,00	7.405.589.977						60,00	60,00	6.556.861.200,00			
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	80,52			83,50	83,50	636.733.050						84,50	84,50	1.568.594.260			
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	73,16			72,32	73,16	5.673.864.700						75,05	73,16	5.545.353.600			
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	-	-	100,00	100,00	-						100,00	100,00	-			
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	-	-	100,00	100,00	6.088.225						100,00	100,00	8.250.000			
7	Indeks distribusi guru	%	100			100,00	100,00	2.235.625						100,00	100,00	5.000.000			
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	46,5	-	-	50,00	46,50	26.152.100						50,00	46,50	-			
9	Proporsi PTK penggerak*	%	19			19,00	19,00	-						19,00	19,00	-			
2	Pendidikan Dasar			85.352	85.352			126.669.525.438		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	84.000	84.000			133.340.593.113		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD			58.411	58.411			81.482.633.728				58.000	58.000			90.090.870.740		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	93,72			94,00	94,00	36.091.822.084						94,00	94,00	42.406.465.320			
2	Angka partisipasi sekolah	%	95,18			95,00	95,00	36.091.822.084						95,00	95,00	42.406.465.320			
3	Kemampuan literasi	Nilai	78,8			65,41	78,80	4.104.448.650						68,07	78,80	2.279.874.700			
4	Kemampuan numerasi	Nilai	61,74			47,09	61,74	4.022.461.750						51,26	61,74	2.196.271.900			
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	4,4			5,00	5,00	-						5,00	5,00	-			
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	16,56			16,00	16,00	-						16,00	16,00	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	75,51			78,63	75,51	332.355.300						80,92	75,51	354.418.800			
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	75,52			76,63	75,52	41.516.500						83,31	75,52	41.315.500			
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58,17			63,82	58,17	-						67,04	58,17	-			
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	87,34			87	87	6.088.225						87	87	8.250.000			
11	Indeks distribusi guru	%	100			100	100	2.235.625						100	100	5.000.000			
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	50,96			50,96	50	789.883.510						50,96	50	392.809.200			
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,03			0,03	0,03	-						0,03	0,03	-			
	SMP			26.941	26.941			45.186.891.710		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	26.000	26.000			43.249.722.373		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	95,86			96,00	95,86	20.808.270.365						96,00	95,86	20.846.411.542			
2	Angka partisipasi sekolah	%	74,20			75,00	74,20	20.808.270.365						75,00	74,20	20.846.411.542			
3	Kemampuan literasi	Nilai	79,18			80,32	79,18	1.771.451.565						85,05	79,18	677.027.045			
4	Kemampuan numerasi	Nilai	68,77			75,94	68,77	1.639.200.565						76,94	68,77	593.862.045			
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	9,28			9,28	9,28	-						9,28	9,28	-			
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	11,79			11,79	11,79	-						11,79	11,79	-			
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,14			76,09	70,14	-						77,88	70,14	-			
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	74,21			73,93	74,21	54.757.700						79,69	74,21	12.000.000			
9	Indeks iklim inklusivitas		58,54			64,31	58,54	32.876.000						67,32	58,54	28.528.500			
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	87,34			88	87	6.088.225						88	87	8.250.000			
11	Indeks distribusi guru	%	100			100	100	2.235.625						100	100	5.000.000			
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	50,96			51	51	-						51	51	-			
13	Proporsi PTK penggerak*	%	47			47	47	28.483.400						47	47	192.231.700			
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%	4			86	86	35.257.900						86	86	40.000.000			
	Pendidikan Kesetaraan			500	500			2.505.426.050		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	500	500			2.218.272.900		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	10,86			100	100	1.248.551.100						100	100	1.102.511.450			
2	Angka partisipasi sekolah	%	10,86			100	100	1.248.551.100						100	100	1.102.511.450			
3	Kemampuan literasi	Nilai	59,61			56,19	56,19	0						57,15	56,19	-			
4	Kemampuan numerasi	Nilai	47,12			51,56	51,56	0						51,75	51,56	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,42			3,42	3,42	0						3,42	3,42				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	4,44			4,4	4,4	0						4,4	4,4	-			
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	69,42			67,74	67,74	0						68,75	67,74	-			
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	63,75			69,06	69,06	0						69,45	69,06				
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55,91			55,85	55,85	0						55,95	55,85				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100			100	100	6.088.225						100	100	8.250.000			
11	Indeks distribusi guru	%	100			100	100	2235625						100	100	5.000.000			
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				-	-							-	-				
13	Proporsi PTK penggerak*	%				-	-							-	-				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pendidikan Anak Usia Dini			21.000	21.000			18.871.082.016		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN	21.000	21.000			22.311.474.450		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah	%	83,62			88,00	88,46	6.392.930.000,00						88,00	88,46	7.945.737.225			
2	Angka partisipasi murni	%	60,79			60,00	60,00	6.392.930.000,00						60,00	60,00	7.945.737.225			
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	80,52			85,50	83,50	330.000.000						85,50	83,50	550.000.000			
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	73,16			75,05	73,16	5.540.972.016						75,05	73,16	5.650.000.000			
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100			100,00	100,00	-						100,00	100,00	-			
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	100			100,00	100,00	8.250.000						100,00	100,00	10.000.000			
7	Indeks distribusi guru	%	100			100,00	100,00	6.000.000						100,00	100,00	10.000.000			
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	46,5			50,00	46,50	100.000.000						50,00	46,50	100.000.000			
9	Proporsi PTK penggerak*	%	19			19,00	19,00	100.000.000						19,00	19,00	100.000.000			
2	Pendidikan Dasar			22.750	22.750			126.415.801.540		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN					143.060.181.133			
	SD			14.950	14.950			82.991.744.150				15.000	15.000			99.754.677.850		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	93,72			94,00	94,00	38.106.615.625						94,00	94,00	46.605.838.925			
2	Angka partisipasi sekolah	%	95,18			95,00	95,00	38.106.615.625						95,00	95,00	46.605.838.925			
3	Kemampuan literasi	Nilai	78,8			68,07	78,80	2.604.265.550						68,07	78,80	2.653.000.000			
4	Kemampuan numerasi	Nilai	61,74			51,26	61,74	2.307.735.550						51,26	61,74	2.350.000.000			
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	4,4			5,00	5,00							5,00	5,00	-			
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	16,56			16,00	16,00							16,00	16,00	-			
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	75,51			80,92	75,51	360.000.000						80,92	75,51	200.000.000			
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	75,52			83,31	75,52	117.825.900						83,31	75,52	320.000.000			
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58,17			67,04	58,17	150.000.000						67,04	58,17	200.000.000			
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	87,34			87	87	8.250.000						87	87	10.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
11	Indeks distribusi guru	%	100			100	100	7.000.000						100	100	10.000.000			
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	50,96			50,96	50	973.435.900						50,96	50	500.000.000			
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,03			0,03	0,03	250.000.000						0,03	0,03	300.000.000			
	SMP			7.800	7.800			43.424.057.390				7.900	7.900			43.305.503.283		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	95,86			96,00	95,86	20.840.891.000						96,00	95,86	20.572.751.642			
2	Angka partisipasi sekolah	%	74,20			75,00	74,20	20.840.891.000						75,00	74,20	20.572.751.642			
3	Kemampuan literasi	Nilai	79,18			85,05	79,18	502.927.795						85,05	79,18	735.000.000			
4	Kemampuan numerasi	Nilai	68,77			76,94	68,77	405.762.795						76,94	68,77	545.000.000			
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	9,28			9,28	9,28	-						9,28	9,28	-			
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	11,79			11,79	11,79	-						11,79	11,79	-			
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,14			77,88	70,14	200.000.000						77,88	70,14	50.000.000			
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	74,21			79,69	74,21	75.000.000						79,69	74,21	130.000.000			
9	Indeks iklim inklusivitas		58,54			67,32	58,54	40.000.000						67,32	58,54	50.000.000			
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	87,34			88	87	8.250.000						88	87	10.000.000			
11	Indeks distribusi guru	%	100			100	100	6.000.000						100	100	10.000.000			
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	50,96			51	51	200.000.000						51	51	250.000.000			
13	Proporsi PTK penggerak*	%	47			47	47	254.334.800						47	47	330.000.000			
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%	4			86	86	50.000.000						86	86	50.000.000			
	Pendidikan Kesetaraan			500	500			2.751.040.000	-	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	500	500			2.225.022.900	-	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	10,86			100	100	1.368.395.000						100	100	1.102.511.450			
2	Angka partisipasi sekolah	%	10,86			100	100	1.368.395.000						100	100	1.102.511.450			
3	Kemampuan literasi	Nilai	59,61			57,45	56,19	-						57,65	56,19				
4	Kemampuan numerasi	Nilai	47,12			51,85	51,56	-						52,15	51,56				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,42			3,42	3,42	-						3,42	3,42				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	4,44			4,4	4,4	0						4,4	4,4				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	69,42			68,85	67,74	0						69,15	67,74				
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	63,75			69,6	69,06	0						69,75	69,06				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55,91			56,15	55,85	0						56,55	55,85				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100			100	100	8.250.000						100	100	10.000.000			
11	Indeks distribusi guru	%	100			100	100	6.000.000						100	100	10.000.000			
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				-	-	0						-	-				
13	Proporsi PTK penggerak*	%				-	-	0						-	-				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pendidikan Anak Usia Dini			21.000	21.000			20.351.474.450		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah	%	83,62			88,00	88,46	6.853.237.225			
2	Angka partisipasi murni	%	60,79			60,00	60,00	6.853.237.225,00			
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	80,52			83,50	83,50	675.000.000			
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	73,16			75,05	73,16	5.750.000.000			
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100			100,00	100,00	-			
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	100			100,00	100,00	10.000.000			
7	Indeks distribusi guru	%	100			100,00	100,00	10.000.000			
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	46,5			50,00	46,50	100.000.000			
9	Proporsi PTK penggerak*	%	19			19,00	19,00	100.000.000			
2	Pendidikan Dasar							143.610.181.133			
	SD			15.100	15.100			100.094.677.850		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	93,72			94,00	94,00	46.610.838.925			
2	Angka partisipasi sekolah	%	95,18			95,00	95,00	46.610.838.925			
3	Kemampuan literasi	Nilai	78,8			68,07	78,80	2.653.000.000			
4	Kemampuan numerasi	Nilai	61,74			51,26	61,74	2.350.000.000			
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	4,4			5,00	5,00	-			
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	16,56			16,00	16,00	-			
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	75,51			80,92	75,51	400.000.000			
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75,52			83,31	75,52	350.000.000			
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58,17			67,04	58,17	200.000.000			
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	87,34			87	87	10.000.000			
11	Indeks distribusi guru	%	100			100	100	10.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	50,96			50,96	50	600.000.000			
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,03			0,03	0,03	300.000.000			
	SMP			7.950	7.950			43.515.503.283		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	95,86			96,00	95,86	20.577.751.642			
2	Angka partisipasi sekolah	%	74,20			75,00	74,20	20.577.751.642			
3	Kemampuan literasi	Nilai	79,18			85,05	79,18	755.000.000			
4	Kemampuan numerasi	Nilai	68,77			76,94	68,77	555.000.000			
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	9,28			9,28	9,28	-			
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	11,79			11,79	11,79	-			
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,14			77,88	70,14	150.000.000			
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,21			79,69	74,21	150.000.000			
9	Indeks iklim inklusivitas		58,54			67,32	58,54	50.000.000			
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	87,34			88	87	10.000.000			
11	Indeks distribusi guru	%	100			100	100	10.000.000			
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	50,96			51	51	300.000.000			
13	Proporsi PTK penggerak*	%	47			47	47	330.000.000			
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%	4			86	86	50.000.000			
3	Pendidikan Kesetaraan			500	500			2.225.022.900		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	10,86			100	100	1.102.511.450			
2	Angka partisipasi sekolah	%	10,86			100	100	1.102.511.450			
3	Kemampuan literasi	Nilai	59,61			57,75	56,19				
4	Kemampuan numerasi	Nilai	47,12			52,45	51,56				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,42			3,42	3,42				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	4,44			4,4	4,4				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	69,42			69,45	67,74				
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	63,75			69,85	69,06				
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55,91			56,75	55,85				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100			100	100	10.000.000			
11	Indeks distribusi guru	%	100			100	100	10.000.000			
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				-	-				
13	Proporsi PTK penggerak*	%				-	-				

Tabel 3. 8 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	orang	7401	7308	7308			1.741.888.000	-	APBD/APBN	Dinkes	7.454	7.454			1.789.353.244	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	2837							APBN				1.098	1.098	335.008.800			
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	374803			1371060	1371060	1.157.174.640		APBN				1.371.206	1.371.206	1.180.318.132			
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	6554			7308	7308	18.270.000						7.454	7.454	65.735.244			
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	9825			7308	7308	64.602.720						7.454	7.454	65.894.774			
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	6541			27	27	8.417.520						27	27	8.417.520			
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	8153			1142	1142	6.281.000						1.288	1.288	6.406.620			
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				7308	7308	72.787.680						7.454	7.454	74.243.434			
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6206			7308	7308	109.620.000						7.454	7.454	111.812.450			
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6206			7308	7308	76.734.000						7.454	7.454	78.268.680			
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				494	494	50.037.658						494	494	50.037.658			
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol				90	90	1.026.000						90	90	1.026.000			
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	45			43	43							43	43				
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	235			225	225							225	225				
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	420			407	407							407	407				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75							75	75				
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				55	55							55	55				
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	7141			45702	45702	479.871.000						46.616	46.616	489.468.000			
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	7501	6980	6980			1.886.759.000	-	APBD/APBN	Dinkes	7119	7119			1.890.647.092	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Formulir partograf	Formulir	6293			6980	6980	194.406.960						7119	7119	1.890.647.092			
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6293			6980	6980	-						7119	7119	-			
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6293			6980	6980	-						7119	7119	-			
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	-						27	27	-			
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	45			41	41	-						41	41	-			
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Paket	420			401	401	-						401	401	-			
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218	-						218	218	-			
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75	-						75	75	-			
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	34			55	55	-						55	55	-			
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru lahir	Orang	7493	6654	6654			1.526.207.000	-	APBD/APBN	Dinkes	6754	6754			1.556.207.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	6158			6654	6654	2.661.600.000		APBN				6754	6754	2.671.000.000		APBN	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	6158			6654	6654	9.222.444		APBN				6754	6754	10.222.444		APBN	
	3 . Salep/teles mata antibiotik	Orang	6230			6654	6654	1.425.386.610		APBN				6754	6754	1.436.866.100		APBN	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	6268			6654	6654	44.415.450						6754	6754	54.415.450			
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	6408			3753	3753	1.800.000						3853	3853	2.800.000			
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6271			6654	6654	96.483.000						6754	6754	97.438.000			
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				494	494	50.388.000						594	594	60.388.000			
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	45			41	41							41	41				
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	420			401	401							401	401				
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218							218	218				
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75							75	75				
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				27	27							27	27				
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				55	55							55	55				
	14 . Kader Kesehatan	Orang				6819	6819							6819	6819				
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	41572	42089	42089			1.117.681.000	-	APBD/APBN	Dinkes	42189	42189			1.147.681.000	-	APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										BN									
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	354430			42089	42089	1.346.848.000		APBN				42189	42189	1.356.848.000		APBN	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	361888			42089	42089	315.667.500						42189	42189	325.667.500			
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	34885			21437	21437	493.051.000		APBN				21537	21537	503.051.000		APBN/pengadaan	
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	5970			3639	3639	36.026.100		APBN				3739	3739	46.026.100		APBN	
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	37411			19230	19230	190.377.000		APBN				19330	19330	200.377.000		APBN	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	14865			42089	42089	14.520.705.000		APBN				42189	42189	14.530.705.000		APBN	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	13615			42089	42089	645.000.000		APBN				42189	42189	655.000.000		APBN	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	27357			42089	42089	2.859.500.000		APBN				42189	42189	2.869.500.000		APBN	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	13870			42089	42089	462.990.000		APBN				42189	42189	472.990.000		APBN	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	14536			42089	42089	925.980.000		APBN				42189	42189	935.980.000		APBN	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	14132			42089	42089	925.980.000		APBN				42189	42189	935.980.000		APBN	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	14502			42089	42089	568.215.000		APBN				42189	42189	578.215.000		APBN	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	222044			108806	108806	8.704.480						108906	108906	18.704.480			
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	45			41	41	17.033.450						41	41				
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket				40	40	2.000.000						40	40				
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	46			41	41							41	41				
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	418			405	405							405	405				
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	231			221	221							221	221				
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	34			55	55							55	55				
	20 . Guru PAUD	Orang	1113			1039	1039							1039	1039				
	21 . Kader Kesehatan	Orang	6315			6819	6819							6819	6819				
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar							722.714.000	-	APBD/APBN	Dinkes			107446	107446	752.714.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatananku	Buku	99744			106446	106446	1.500.888.600		APBN				107446	107446	1.550.888.600		APBN	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	99744			106446	106446	38.340.000						107446	107446	88.340.000			
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	99744			106446	106446	38.340.000						107446	107446	88.340.000			
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	27			27	27	2.754.000						1027	1027	52.754.000			
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	27			27	27	2.754.000						1027	1027	52.754.000			
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet				3499080	3499080	1.154.670.000		APBN				3500080	3500080	1.204.670.000		APBN	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb	Alat				106446	106446	940.982.640		APBN				107446	107446	990.982.640		APBN	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip				50683	50683	448.037.720						51683	51683	498.037.720			
	9 . Media promosi kesehatan	Paket				27	27	2.754.000						1027	1027	52.754.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin				50683	50683	1.849.820.000		APBN				51683	51683	1.899.820.000		APBN	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	205			41	41							41	41				
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	418			401	401							401	401				
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218							218	218				
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			55	55							55	55				
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75							75	75				
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27			26	26							26	26				
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	1157			1137	1137							1137	1137				
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	6315			4253	4253							4253	4253				
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	303080	418083	418083			722.714.000	-	APBD/APBN	Dinkes	418183	418183			752.714.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000						27	27	3.240.000			
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit				494	494	741.000						494	494	741.000			
	3. Alat : Tensimeter	Unit	759			494	494	224.317.990						494	494	224.317.990			
	4. Alat : Glukometer	Unit	800			494	494	220.324.000						494	494	220.324.000			
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	27			27	27	7.425.000						27	27	7.425.000			
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	192857			418083	418083	1.559.380						418183	418183	1.559.380			
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	27			418083	418083	272.700.000						418183	418183	1.559.380			
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit				418083	418083	5.120.000						418183	418183	5.120.000			
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit				1	1	480.000						1	1	480.000			
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen				1	1	2.700.000						1	1	2.700.000			
	11. Alat Pelayanan KB	Unit				55	55	33.990.000						55	55	33.990.000			
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	192857			418083	418083							418083	418083			APBN	
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul				418083	418083							418083	418083			Vaksin APBN	
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	205			41	41							41	41				
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	418			401	401							401	401				
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218							218	218				
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			55	55							55	55				
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26			26	26							26	26				
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2114			2114	2114							2114	2114				
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	102862	130855	130855			1.291.870.000	-	APBD/APBN	Dinkes	130955	130955			1.321.870.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	494			494	494	190.190.000						494	494	190190000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	494			495	495	220.770.000						495	495	220770000			
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	494			496	496	136.896.000						496	496	136896000			
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	102862			130855	130855	480.600.000						130955	130955	480600000			
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	102862			130855	130855	981.412.500						130955	130955	981412500			
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	102862			130855	130855							130955	130955			APBN	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27							27	27				
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	205			205	205							205	205				
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	727			727	727							727	727				
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			861	861							861	861				
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			30	30							30	30				
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27			27	27							27	27				
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27			27	27							27	27				
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	61663	163373	163373			58.892.000	-	APBD/APBN	Dinkes	163473	163473			88.892.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000						27	27	3.240.000			
	2 . Obat Hipertensi	Paket	61663			163373	163373	88.221.420						163473	163473	88.275.420			
	3 . Tensimeter	Unit	494			494	494	22.271.990						494	494	22.271.990			
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	paket	61663			163373	163373			APBN				163473	163473			APBN	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000						27	27	3.240.000			
	6 . Tenaga medis : Dokter	orang	45			45	45							45	45				
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	orang	727			727	727							727	727				
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	orang	861			861	861							861	861				
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	30			27	27							27	27				
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	orang	2			2	2							2	2				
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	75			75	75							75	75				
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	26			26	26							26	26				
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		9327	7766	7766			51.576.600	-	APBD/APBN	Dinkes	7866	7866			81.576.600	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	9327			7766	7766	3.634.488.000						7866	7866	3.681.288.000			
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	27			27	27	12.042.000						27	27	12.636.000			
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	9327			7766	7766	13.978.800						7866	7866	3.681.288.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	9327			7766	7766			APBN				7866	7866	3.681.288.000			
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000						27	27	12.636.000			
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	45			27	27							27	27				
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	727			45	45							45	45				
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			727	727							727	727				
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	75			861	861							861	861				
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26			75	75							75	75				
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			26	26							26	26				
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	42			30	30							30	30				
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	3880	4826	4826			70.946.000	-	APBD/APBN	Dinkes	4926	4926			100.946.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	27			27	27							27	27	APBN			
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Jenis				27	27							27	27	APBN			
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	3880			4826	4826							4926	4926	APBN			
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	3880			4826	4826							4926	4926	APBN			
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	27			27	27	3.240.000						27	27	3.240.000			
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	45			45	45							45	45				
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	27			27	27							27	27				
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	27			27	27							27	27				
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	27			27	27							27	27				
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	8703	8732	8732			236.835.300	-	APBD/APBN	Dinkes	8832	8832			266.835.300	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000						27	27	3.240.000			
	2. Reagen Zn TB	Kit	27			27	27	10.368.000						27	27	10.368.000			
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	8703			8732	8732	78.588.000						8832	8832	79.488.000			
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	8703			8732	8732			APBN				8832	8832			APBN	
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	14			27	27	6.814.800						27	27	6.814.800			
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	8703			8732	8732			APBN				8832	8832			APBN	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	39			39	39	-						39	39	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8 . Tuberkulin	Vial	27			27	27	1.658.880						27	27	1.658.880			
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	45			45	45							45	45				
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			861	861							861	861				
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	75			75	75							75	75				
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26			26	26							26	26				
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	42			42	42							42	42				
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	9			9	9							9	9				
	15 . Kader Kesehatan	Orang	45			45	45							45	45				
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	9757						-	APBD/APBN	Dinkes						-	APBD/APBN	Dinkes
				9611	9611			100.535.000				9711	9711			130.535.000			
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	34			34	34	4.080.000						34	34	4.080.000			
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	9757			9611	9611	139.359.500						9711	9711	140.809.500			
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	9757			9611	9611							9711	9711			APBN	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	9757			9611	9611							9711	9711			APBN	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	45			45	45							45	45				
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	218			218	218							218	218				
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			861	861							861	861				
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	727			727	727							727	727				
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	26			26	26							26	26				
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	45			45	45							45	45				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	10	27	28	29	30	31	32	33	10	35	36
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	orang	7401	7.603	7.603			1.836.818.488	-	APBD/APBN	Dinkes	7.755	7.755			1.884.283.732	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	2837			1.098	1.098	341.577.600						1.098	1.098	348.146.400			
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	374803			1.371.206	1.371.206	1.203.461.624						1.371.206	1.371.206	1.226.605.116			
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	6554			7.454	7.454	113.200.488						7.454	7.454	160.665.732			
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	9825			7.454	7.454	67.186.828						7.454	7.454	68.478.882			
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	6541			27	27	8.417.520						27	27	8.417.520			
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	8153			1.288	1.288	6.532.240						1.288	1.288	6.657.860			
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				7.454	7.454	75.699.188						7.454	7.454	77.154.942			
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6206			7.454	7.454	114.004.900						7.454	7.454	116.197.350			
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6206			7.454	7.454	79.803.360						7.454	7.454	81.338.040			
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				494	494	50.037.658						494	494	50.037.658			
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol				90	90	1.026.000						90	90	1.026.000			
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	45																
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	235			43	43							43	43				
						225	225							225	225				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	10	27	28	29	30	31	32	33	10	35	36
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	420			407	407							407	407				
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75							75	75				
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				55	55							55	55				
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	7141			47.530	47.530	499.065.000						48.444	48.444	508.662.000			
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	7501	7261	7261			236.005.634				7406	7406			240.048.806			
	1. Formulir partograf	Formulir	6293			7261	7261	236.005.634						7406	7406	240.048.806			
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6293			7261	7261	-						7406	7406	-			
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6293			7261	7261	-						7406	7406	-			
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	-						27	27	-			
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	45			41	41	-						41	41	-			
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Paket	420			401	401	-						401	401	-			
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218	-						218	218	-			
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75	-						75	75	-			
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	34			55	55	-						55	55	-			
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru lahir	Orang	7493	6854	6854			1.586.207.000	-	APBD/APBN	Dinkes	6954	6954			1.616.207.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	6158			6854	6854	2.681.000.000		APBN				6954	6954	2.691.000.000		APBN	
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	6158			6854	6854	20.222.444		APBN				6954	6954	30.222.444		APBN	
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	6230			6854	6854	1.446.866.100		APBN				6954	6954	1.456.866.100		APBN	
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	6268			6854	6854	64.415.450		APBN				6954	6954	74.415.450			
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	6408			3953	3953	12.800.000						4053	4053	22.800.000			
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6271			6854	6854	107.438.000						6954	6954	117.438.000			
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				694	694	70.388.000						794	794	80.388.000			
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	45			41	41							41	41				
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	420			401	401							401	401				
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218							218	218				
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75							75	75				
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				27	27							27	27				
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				55	55							55	55				
	14. Kader Kesehatan	Orang				6819	6819							6819	6819				
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	41572	42289	42289			1.177.681.000	-	APBD/APBN	Dinkes	42389	42389			1.207.681.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Kuisiorer Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	354430			42289	42289	1.366.848.000		APBN				42389	42389	1.376.848.000		APBN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	10	27	28	29	30	31	32	33	10	35	36
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	361888			42289	42289	335.667.500						42389	42389	345.667.500			
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	34885			21637	21637	513.051.000		APBN				21737	21737	523.051.000		APBN/pengada an	
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	5970			3839	3839	56.026.100		APBN				3939	3939	66.026.100		APBN	
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	37411			19430	19430	210.377.000		APBN				19530	19530	220.377.000		APBN	
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	14865			42289	42289	14.540.705.000		APBN				42389	42389	14.550.705.000		APBN	
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	13615			42289	42289	665.000.000		APBN				42389	42389	675.000.000		APBN	
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	27357			42289	42289	2.879.500.000		APBN				42389	42389	2.889.500.000		APBN	
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	13870			42289	42289	482.990.000		APBN				42389	42389	492.990.000		APBN	
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	14536			42289	42289	945.980.000		APBN				42389	42389	955.980.000		APBN	
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	14132			42289	42289	945.980.000		APBN				42389	42389	955.980.000		APBN	
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	14502			42289	42289	588.215.000		APBN				42389	42389	598.215.000		APBN	
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	222044			109006	109006	28.704.480						109106	109106	38.704.480			
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	45			41	41							41	41				
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket				40	40							40	40				
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	46			41	41							41	41				
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	418			405	405							405	405				
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	231			221	221							221	221				
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	34			55	55							55	55				
	20. Guru PAUD	Orang	1113			1039	1039							1039	1039				
	21. Kader Kesehatan	Orang	6315			6819	6819							6819	6819				
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			108446	108446			782.714.000	-	APBD/APBN	Dinkes	109446	109446			812.714.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatan	Buku	99744			108446	108446	1.600.888.600		APBN				109446	109446	1.650.888.600		APBN	
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	99744			108446	108446	138.340.000						109446	109446	188.340.000			
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	99744			108446	108446	138.340.000						109446	109446	188.340.000			
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	27			2027	2027	102.754.000						3027	3027	152.754.000			
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	27			2027	2027	102.754.000						3027	3027	152.754.000			
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet				3501080	3501080	1.254.670.000		APBN				3502080	3502080	1.304.670.000		APBN	
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat				108446	108446	1.040.982.640		APBN				109446	109446	1.090.982.640		APBN	
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip				52683	52683	548.037.720						53683	53683	598.037.720			
	9. Media promosi kesehatan	Paket				2027	2027	102.754.000						3027	3027	152.754.000			
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin				52683	52683	1.949.820.000		APBN				53683	53683	1.999.820.000		APBN	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	205			41	41							41	41				
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	418			401	401							401	401				
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218							218	218				
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			55	55							55	55				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	10	27	28	29	30	31	32	33	10	35	36
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75							75	75				
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27			26	26							26	26				
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	1157			1137	1137							1137	1137				
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	6315			4253	4253							4253	4253				
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	303080	418.283	418.283			782.714.000	-	APBD/APBN	Dinkes					812.714.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000						27	27	3.240.000			
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit				494	494	741.000						494	494	741.000			
	3. Alat : Tensimeter	Unit	759			494	494	224.317.990						494	494	224.317.990			
	4. Alat : Glukometer	Unit	800			494	494	220.324.000						494	494	220.324.000			
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	27			27	27	7.425.000						27	27	7.425.000			
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	192857			418283	418283	1.559.380						418383	418383	1.559.380			
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	27			418283	418283	1.559.380						418383	418383	1.559.380			
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit				418283	418283	5.120.000						418383	418383	5.120.000			
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit				1	1	480.000						1	1	480.000			
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen				1	1	2.700.000						1	1	2.700.000			
	11. Alat Pelayanan KB	Unit				55	55	33.990.000						55	55	33.990.000			
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	192857			418183	418183							418083	418083			APBN	
	13. Vaksin Tetanus Differi (td)	Ampul				418183	418183							418083	418083			Vaksin APBN	
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	205			41	41							41	41				
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	418			401	401							401	401				
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218							218	218				
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			55	55							55	55				
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26			26	26							26	26				
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2114			2114	2114							2114	2114				
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	102862	131055	131055			1.351.870.000	-	APBD/APBN	Dinkes	131155	131155			1.381.870.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	494			494	494	190190000						494	494	190190000			
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	494			495	495	220770000						495	495	220770000			
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	494			496	496	136896000						496	496	136896000			
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	102862			131055	131055	480600000						131155	131155	480600000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	10	27	28	29	30	31	32	33	10	35	36
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	102862			131055	131055	981412500						131155	131155	981412500			
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	102862			131055	131055							131155	131155			APBN	
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27							27	27				
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	205			205	205							205	205				
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	727			727	727							727	727				
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			861	861							861	861				
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			30	30							30	30				
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27			27	27							27	27				
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27			27	27							27	27				
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	61663	163573	163.573			118.892.000	-	APBD/APBN	Dinkes	163673	163.673			148.892.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000						27	27	3.240.000			
	2. Obat Hipertensi	Paket	61663			163573	163573	88.329.420						163673	163673	88.383.420			
	3. Tensimeter	Unit	494			494	494	22.271.990						494	494	22.271.990			
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	paket	61663			163573	163573							163673	163673			APBN	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000						27	27	3.240.000			
	6. Tenaga medis : Dokter	orang	45			45	45							45	45				
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	727			727	727							727	727				
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	861			861	861							861	861				
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	30			27	27							27	27				
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	orang	2			2	2							2	2				
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefamasian	orang	75			75	75							75	75				
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	26			26	26							26	26				
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		9327	7966	7966			111.576.600	-	APBD/APBN	Dinkes	8066	8066			141.576.600	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	9327			7966	7966	3.728.088.000						8066	8066	3.774.888.000			
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	27			27	27	12.636.000						27	27	12.636.000			
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	9327			7966	7966	3.728.088.000						8066	8066	3.774.888.000			
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	9327			7966	7966	3.728.088.000						8066	8066	3.774.888.000			
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	12.636.000						27	27	12.636.000			
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	45			27	27							27	27				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	10	27	28	29	30	31	32	33	10	35	36
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	727			45	45							45	45				
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			727	727							727	727				
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	75			861	861							861	861				
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26																
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			75	75							75	75				
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	42			26	26							26	26				
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	3880	5026	5026			130.946.000	-	APBD/APBN	Dinkes	5126	5126			160.946.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Buku Pedoman Penggolong dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	27											27	27			APBN	
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Jenis												27	27			APBN	
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	3880			5026	5026							5126	5126			APBN	
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	3880			5026	5026							5126	5126			APBN	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	27					3.240.000						27	27	3.240.000			
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	45			45	45							45	45				
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	27											27	27				
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	27											27	27				
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	27											27	27				
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	8703	8932	8932			296.835.300	-	APBD/APBN	Dinkes	9032	9032			326.835.300	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27					3.240.000						27	27	3.240.000			
	2. Reagen Zn TB	Kit	27					10.368.000						27	27	10.368.000			
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	8703					80.388.000						9032	9032	81.288.000			
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	8703											9032	9032			APBN	
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	14					6.814.800						27	27	6.814.800			
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	8703											9032	9032			APBN	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	39											39	39				
	8. Tuberkulin	Vial	27					1.658.880						27	27	1.658.880			
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	45											45	45				
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861											861	861				
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	75											75	75				
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26											26	26				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	10	27	28	29	30	31	32	33	10	35	36
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	42			42	42							42	42				
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	9			9	9							9	9				
	15 . Kader Kesehatan	Orang	45			45	45							45	45				
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	9757	9811	9811			160.535.000	-	APBD/APBN	Dinkes	9911	9911			190.535.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	34			34	34	4.080.000						34	34	4.080.000			
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	9757			9811	9811	142.259.500						9911	9911	143.709.500			
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	9757			9811	9811							9911	9911	APBN			
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	9757			9811	9811							9911	9911	APBN			
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	45			45	45							45	45				
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	218			218	218							218	218				
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			861	861							861	861				
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	727			727	727							727	727				
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	26			26	26							26	26				
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan perjangkauan	Orang	45			45	45							45	45				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	10	43	44
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	orang	7401	7.910	7.910			1.931.748.976	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	2837			1.098	1.098	354.715.200			
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	374803			1.371.206	1.371.206	1.249.748.608			
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	6554			7.454	7.454	208.130.976			
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	9825			7.454	7.454	69.770.936			
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	6541			27	27	8.417.520			
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	8153			1.288	1.288	6.783.480			
	(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)										
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				7.454	7.454	78.610.696			
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6206			7.454	7.454	118.389.800			
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6206			7.454	7.454	82.872.720			
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				494	494	50.037.658			
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol				90	90	1.026.000			
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	45			43	43				
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	235			225	225				
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	420			407	407				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	10	43	44
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75				
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				55	55				
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	7141			49.358	49.358	518.259.000			
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	7501	6980	6980			194.404.600			
	1 . Formulir partograf	Formulir	6293			6980	6980	194.404.600			
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	6293			6980	6980	-			
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6293			6980	6980	-			
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				27	27	-			
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	45			41	41	-			
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Paket	420			401	401	-			
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218	-			
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75	-			
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	34			55	55	-			
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru lahir	Orang	7493	7054	7054			1.646.207.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	6158			7.054	7.054	2.701.000.000		APBN	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	6158			7.054	7.054	40.222.444		APBN	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	6230			7.054	7.054	1.466.866.100		APBN	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	6268			7.054	7.054	84.415.450			
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	6408			4.153	4.153	32.800.000			
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6271			7.054	7.054	127.438.000			
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				894	894	90.388.000			
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	45			41	41				
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	420			401	401				
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218				
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75				
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				27	27				
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				55	55				
	14 . Kader Kesehatan	Orang				6819	6819				
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	41572	42489	42489			1.237.681.000	-	APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	10	43	44
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	354430			42489	42489	1.386.848.000		APBN	
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	361888			42489	42489	355.667.500			
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	34885			21837	21837	533.051.000		APBN	
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	5970			4039	4039	76.026.100		APBN	
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	37411			19630	19630	230.377.000		APBN	
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	14865			42489	42489	14.560.705.000		APBN	
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	13615			42489	42489	685.000.000		APBN	
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	27357			42489	42489	2.899.500.000		APBN	
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	13870			42489	42489	502.990.000		APBN	
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	14536			42489	42489	965.980.000		APBN	
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	14132			42489	42489	965.980.000		APBN	
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	14502			42489	42489	608.215.000		APBN	
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	222044			109206	109206	48.704.480			
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	45			141	141				
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket				140	140				
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	46			141	141				
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	418			505	505				
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	231			321	321				
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	34			155	155				
	20. Guru PAUD	Orang	1113			1139	1139				
	21. Kader Kesehatan	Orang	6315			6919	6919				
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			110446	110446			842.714.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatan	Buku	99744			110446	110446	1.700.888.600		APBN	
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	99744			110446	110446	238.340.000			
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	99744			110446	110446	238.340.000			
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	27			4027	4027	202.754.000			
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	27			4027	4027	202.754.000			
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun dituar sekolah	Tablet				3503080	3503080	1.354.670.000		APBN	
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat				110446	110446	1.140.982.640		APBN	
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip				54683	54683	648.037.720			
	9. Media promosi kesehatan	Paket				4027	4027	202.754.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	10	43	44
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin				54683	54683	2.049.820.000		APBN	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	205			41	41				
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	418			401	401				
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218				
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			55	55				
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				75	75				
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27			26	26				
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	1157			1137	1137				
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	6315			4253	4253				
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	303080					842.714.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000			
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit				494	494	741.000			
	3. Alat : Tensimeter	Unit	759			494	494	224.317.990			
	4. Alat : Glukometer	Unit	800			494	494	220.324.000			
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	27			27	27	7.425.000			
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	192857			418483	418483	1.559.380			
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	27			418483	418483	1.559.380			
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit				418483	418483	5.120.000			
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit				1	1	480.000			
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen				1	1	2.700.000			
	11. Alat Pelayanan KB	Unit				55	55	33.990.000			
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	192857			418083	418083	AAPBN			
	13. Vaksin Tetanus Differi (td)	Ampul				418083	418083	Vaksin APBN			
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	205			41	41				
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	418			401	401				
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	228			218	218				
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			55	55				
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26			26	26				
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2114			2114	2114				
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	102862	131255	131255			1.411.870.000	-	APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	10	43	44
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	494			494	494	190190000			
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	494			495	495	220770000			
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	494			496	496	136896000			
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	102862			131255	131255	480600000			
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	102862			131255	131255	981412500			
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	102862			131255	131255				
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27				
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	205			205	205				
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	727			727	727				
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			861	861				
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			30	30				
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27			27	27				
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27			27	27				
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	61663	163773	163.773			178.892.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000			
	2. Obat Hipertensi	Paket	61663			163773	163773	88.437.420			
	3. Tensimeter	Unit	494			494	494	22.271.990			
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	paket	61663			163773	163773				
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000			
	6. Tenaga medis : Dokter	orang	45			45	45				
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	orang	727			727	727				
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	orang	861			861	861				
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	orang	30			27	27				
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	orang	2			2	2				
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	orang	75			75	75				
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	orang	26			26	26				
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		9327	8166	8166			171.576.600	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	9327			8166	8166	3.821.688.000			
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	27			27	27	12.636.000			
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	9327			8166	8166	3.821.688.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	10	43	44
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	9327			8166	8166	3.821.688.000			
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	12.636.000			
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	45			27	27				
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	727			45	45				
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			727	727				
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	75			861	861				
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26			75	75				
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	30			26	26				
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	42			30	30				
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	3880	5226	5226			190.946.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	27			27	27				
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Jenis				27	27				
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	3880			5226	5226				
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	3880			5226	5226				
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	27			27	27	3.240.000			
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	45			45	45				
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	27			27	27				
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	27			27	27				
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	27			27	27				
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	8703	9132	9132			329.835.300	-	APBD/APBN	Dinkes
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27			27	27	3.240.000			
	2. Reagen Zn TB	Kit	27			27	27	10.368.000			
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	8703			9132	9132	82.188.000			
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	8703			9132	9132				
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	14			27	27	6.814.800			
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	8703			9132	9132				
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	39			39	39	-			
	8. Tuberkulin	Vial	27			27	27	1.658.880			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	10	43	44
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	45			45	45				
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			861	861				
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	75			75	75				
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	26			26	26				
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	42			42	42				
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	9			9	9				
	15 . Kader Kesehatan	Orang	45			45	45				
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	9757	10011	10011			220.535.000	-	APBD/APBN	Dinkes
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	34			34	34	4.080.000			
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	9757			10011	10011	145.159.500			
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	9757			10011	10011				
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	9757			10011	10011				
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	45			45	45				
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	218			218	218				
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	861			861	861				
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	727			727	727				
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	26			26	26				
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	45			45	45				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	-																
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	3.032	2.228	2.228			5.741.441.000	1.400.000.000	APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR	2.000	2.000			5.083.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	758			557	557			APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR			500	500	5.083.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	758			557	557			APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR			500	500	5.083.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-			0	0							0	0				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM																		
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau	Rumah Tangga	-																
2	Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik	Orang	3.032	2.000	2.000			5.071.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR	2.000	2.000			5.071.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	758			500	500	5.071.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR			500	500	5.071.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset	Rumah Tangga	758			500	500	5.071.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR			500	500	5.071.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T																		
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-			0	0	-						0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	3.032	2.000	2.000			5.071.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	758			500	500	5.071.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	758			500	500	5.071.000.000		APBD Kab. Purworejo dan DAK	Dinas PUPR
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-			0	0	-			

Tabel 3. 10 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	51	8	8	0						24	0	0					Dinperkimtan
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)																		
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	2	2	17.000.000		Baznas Kab. Purworejo	Baznas Kab. Purworejo	0	0	0					
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0						0	0	0					
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	16	0	0	0						0	0	6		240.000.000		APBD Provinsi Jawa Tengah	
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0						0	0	0					
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																		
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1	1	1			74.077.000,00		APBD	Dinperkimtan	1	1	1	1	25.091.800,00			
	Ada Relokasi Program Pemerintah																		
2	Facilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0			0				0		0		0			
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana																		
	Ada Relokasi Program Pemerintah																		
1	Facilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan																		
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0			0				0		0		0			
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0			0				0		0		0			
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	0			0				0		0		0			
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0			0				0		0		0			
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah																		
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	0			0				0		0		0			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		16	20	0	0						20	0	0					
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)																		
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0						0	0	0					
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0						0	0	0					
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	16	0	0	5		250.000.000		APBD	Dinperkimtan	0	0	5		250.000.000		APBD	Dinperkimtan
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0						0	0	0					
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																		
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1	1	1	1	1	25.091.800,00		APBD	Dinperkimtan	1	1	1	1	25.091.800,00		APBD	Dinperkimtan
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	0		0				0	0	0		0			
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana																		
	Ada Relokasi Program Pemerintah																		
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan																		
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0		0				0	0	0		0			
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0	0		0				0	0	0		0			
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	0	0		0				0	0	0		0			
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0	0		0				0	0	0		0			
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah																		
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	0	0		0				0	0	0		0			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		16	20	0	0					
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)										
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0					
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0					
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	16	0	0	5		250.000.000		APBD	Dinperkintan
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	0					
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)										
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1	1	1	1	1	25.091.800,00		APBD	Dinperkintan
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	0		0		0			
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana										
	Ada Relokasi Program Pemerintah										
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0		0		0			
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0		0		0			
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0		0		0			
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0		0		0			
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0		0		0			

Tabel 3. 11 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	2538	1.500	1.500			5.605.353.260		DAU	SATPOL PP DAMKAR	1.510	1.510			2.820.970.100		DAU	SATPOL PP DAMKAR
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	25			26	26	616.901.200		DAU	SATPOL PP DAMKAR			26	26	606.220.100		DAU	SATPOL PP DAMKAR
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	6			13	13	352.250.700		DAU	SATPOL PP DAMKAR			13	13	372.752.200		DAU	SATPOL PP DAMKAR
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	158			46	46	301.200.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR			47	47	300.822.700		DAU	SATPOL PP DAMKAR
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1			2	2	4.328.501.360		DAU	SATPOL PP DAMKAR			2	2	1.534.675.100		DAU	SATPOL PP DAMKAR
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	5			2	2	6.342.400		DAU	SATPOL PP DAMKAR			4	4	6.342.400		DAU	SATPOL PP DAMKAR
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	3			2	2	157.600		DAU	SATPOL PP DAMKAR			4	4	157.600		DAU	SATPOL PP DAMKAR
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		26	50	50			3.136.918.300		DAU	SATPOL PP DAMKAR	55	55			1.174.411.500		DAU	SATPOL PP DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	59			35	35	1.115.558.900		DAU	SATPOL PP DAMKAR			37	37	641.648.400		DAU	SATPOL PP DAMKAR
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	3			4	4	4.386.700		DAU	SATPOL PP DAMKAR			6	6	136.569.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	42			349	349	1.960.775.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR			370	370	277.202.900		DAU	SATPOL PP DAMKAR
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	39			38	38	-		DAU	SATPOL PP DAMKAR			40	40	62.793.900		DAU	SATPOL PP DAMKAR
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	59			24	24	28.098.850		DAU	SATPOL PP DAMKAR			26	26	28.098.650		DAU	SATPOL PP DAMKAR
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	59			12	12	28.098.850		DAU	SATPOL PP DAMKAR			14	14	28.098.650		DAU	SATPOL PP DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	2538	1.520	1.520			3.716.561.900		DAU	SATPOL PP DAMKAR	1.530	1.530			3.716.561.900		DAU	SATPOL PP DAMKAR
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	25			26	26	1.332.250.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR			26	26	1.332.250.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan urjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	6			12	12	648.682.800		DAU	SATPOL PP DAMKAR			12	12	648.682.800		DAU	SATPOL PP DAMKAR
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	158			48	48	385.688.600		DAU	SATPOL PP DAMKAR			48	48	385.688.600		DAU	SATPOL PP DAMKAR
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1			2	2	1.343.340.500		DAU	SATPOL PP DAMKAR			2	2	1.343.340.500		DAU	SATPOL PP DAMKAR
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	5			4	4	6.000.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR			4	4	6.000.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	3			4	4	600.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR			4	4	600.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		26	55	55			3.500.968.500		DAU	SATPOL PP DAMKAR	55	55			3.500.968.500		DAU	SATPOL PP DAMKAR
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	59			40	40	701.888.900		DAU	SATPOL PP DAMKAR			40	40	701.888.900		DAU	SATPOL PP DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	3			7	7	6.849.100		DAU	SATPOL PP DAMKAR			7	7	6.849.100		DAU	SATPOL PP DAMKAR
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	42			380	380	2.499.782.700		DAU	SATPOL PP DAMKAR			380	380	2.499.782.700		DAU	SATPOL PP DAMKAR
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	39			40	40	152.182.300		DAU	SATPOL PP DAMKAR			40	40	152.182.300		DAU	SATPOL PP DAMKAR
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	59			28	28	70.132.750		DAU	SATPOL PP DAMKAR			28	28	70.132.750		DAU	SATPOL PP DAMKAR
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	59			16	16	70.132.750		DAU	SATPOL PP DAMKAR			16	16	70.132.750		DAU	SATPOL PP DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	2538	1.540	1.540			3.716.561.900		DAU	SATPOL PP DAMKAR
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	25			26	26	1.332.250.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	6			12	12	648.682.800		DAU	SATPOL PP DAMKAR
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus dilidat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	158			48	48	385.688.600		DAU	SATPOL PP DAMKAR
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1			2	2	1.343.340.500		DAU	SATPOL PP DAMKAR
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	5			4	4	6.000.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	3			4	4	600.000		DAU	SATPOL PP DAMKAR
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		26	55	55			3.500.968.500		DAU	SATPOL PP DAMKAR
1	Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	59			40	40	701.888.900		DAU	SATPOL PP DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	<i>dokumen</i>	3			7	7	6.849.100		DAU	SATPOL PP DAMKAR
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>	42			380	380	2.499.782.700		DAU	SATPOL PP DAMKAR
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>	39			40	40	152.182.300		DAU	SATPOL PP DAMKAR
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>	59			28	28	70.132.750		DAU	SATPOL PP DAMKAR
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	<i>layanan</i>	59			16	16	70.132.750		DAU	SATPOL PP DAMKAR

Tabel 3. 12 Renaksi Penerapan SPM Bidang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		17.485	17.485	17.485			165.708.660		APBD	BPBD	17.485	17.485			175.619.620	-	APBD	BPBD
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	-							APBD	BPBD							APBD	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	-					-		APBD	BPBD					-		APBD	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	17.485			318.449	318.449	91.711.800		APBD	BPBD			318.449	318.449	100.882.800		APBD	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	0			50	50	73.996.860		APBD	BPBD			50	50	74.736.820		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			17.485	17.485			2.490.838.240		APBD	BPBD	17.485	17.485			3.550.000.000		APBD	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	135			101	101	1.985.454.620		APBD	BPBD			55	55	2.005.309.166		APBD	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	360			360	360	505.383.620		APBD	BPBD			366	366	555.937.456		APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			17.485	17.485			919.010.000	-	APBD	BPBD	17.485	17.485			1.731.795.000	-	APBD	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	2			2	2	35.475.200		APBD	BPBD			2	2	35.475.200			
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang								APBD	BPBD							APBD	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	12			12	12	730.046.400		APBD	BPBD			12	12	737.346.864		APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			1	1	137.612.100		APBD	BPBD			1	1	138.988.221		APBD	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	265			15	15	15.876.300		APBD	BPBD			12	12	16.035.063		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		17.485	17.485	17.485			775.619.620	-	APBD	BPBD	17.485	17.485			427.375.816		APBD	BPBD
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	-			1	1	350.000.000		APBD	BPBD							APBD	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	-			318.449	318.449	250.000.000		APBD	BPBD			318.449	318.449	250.000.000		APBD	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	17.485			318.449	318.449	100.882.800		APBD	BPBD			318.449	318.449	101.891.628		APBD	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	0			50	50	74.736.820		APBD	BPBD			50	50	75.484.188		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			17.485	17.485			2.561.246.622	-	APBD	BPBD	17.485	17.485			2.592.474.055	-	APBD	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	135			55	55	2.005.309.166		APBD	BPBD			63	63	2.025.362.257		APBD	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	360			366	366	555.937.456		APBD	BPBD			366	366	561.496.830		APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			17.485	17.485			977.845.348	-	APBD	BPBD	17.485	17.485			992.123.800	-	APBD	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	2			2	2	35.475.200		APBD	BPBD			2	2	35.829.952		APBD	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang				50	50	50.000.000		APBD	BPBD			50	50	55.000.000		APBD	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	12			12	12	737.346.864		APBD	BPBD			12	12	744.720.332		APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			1	1	138.988.221		APBD	BPBD			1	1	140.378.103		APBD	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	265			12	12	16.035.063		APBD	BPBD			12	12	16.195.413		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		17.485	17.485	17.485			430.630.657		APBD	BPBD
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	-							APBD	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	-			318.449	318.449	252.500.000		APBD	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	17.485			318.449	318.449	101.891.628		APBD	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	0			61	61	76.239.029		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			17.485	17.485			2.592.474.055	-	APBD	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	135			20	20	2.025.362.257		APBD	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	360			568	568	567.111.798		APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			17.485	17.485			1.152.807.559	-	APBD	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	2			1	1	36.188.251		APBD	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang				318.449	318.449	60.500.000		APBD	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	12			12	12	752.167.535		APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			1	1	140.378.103		APBD	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	265			113	113	163.573.670		APBD	BPBD

Tabel 3. 13 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pantli Sosial		312	350	350			324.748.100	217.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	351	351			365.000.000	217.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			3	3		2.000.000					2	2		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	1			6	6		2.000.000					2	2		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1			55	55	178.282.800		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	200.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	186			4	4		2.000.000					4	4		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	1			200	200		200.000.000					200	200		200.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	106			2	2		2.000.000					2	2		2.000.000		
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1			30	30	69.465.300		APBD	DINAS SOSIAL			30	30	75.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	pertemuan	1			2	2	7.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			2	2	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1			5	5	-	3.000.000					5	5	-	3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	2.000.000					3	3	-	2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3	-	3.000.000					3	3	-	3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1			40	40	70.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			45	45	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	50	136	136			382.000.000	8.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	139	139			412.000.000	8.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			6	6		1.000.000					6	6		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan ke darurat/layanan reaksi cepat layanan ke darurat/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	1			5	5		1.000.000					5	5		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	35			45	45	300.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	320.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1			2	2		1.000.000					2	2		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			2	2	-	1.000.000					2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1			2	2	-	1.000.000					2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Pertemuan	1			3	3	7.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			3	3	7.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	15			20	20	5.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			15	15	5.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1			40	40	70.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			45	45	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	86	172	172			87.000.000	209.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	176	176			98.000.000	229.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			6	6	-	1.000.000					6	6	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5			10	10	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			10	10	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	81			90	90	200.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100		220.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			2	2	-	1.000.000					2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1			2	2	-	1.000.000					2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Pertemuan	1			2	2	7.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			3	3	8.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3		1.000.000					3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3		1.000.000					3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1			40	40	70.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			45	45	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
																		APBD	DINAS SOSIAL
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	40	83	83			77.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	95	95			88.000.000	16.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			4	4		1.000.000					4	4		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan ke darurat/layanan reaksi cepat layanan ke darurat/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	1			3	3		1.000.000					3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1			3	3		1.000.000					3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1			3	3		3.000.000					3	3		3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1			5	5	-	5.000.000					6	6	-	5.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Pertemuan	1			2	2	7.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			2	2	8.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000					3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	40			40	40	70.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
m	Layanan Rujukan	orang	1			3	3							3	3				
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			2	2	-						2	2	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	1			3	3	-						4	4	-			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	397	587	587			137.998.801		APBD	DINAS SOSIAL	713	713			172.000.001		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana																		
1	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	311			400	400	79.998.800		APBD	DINAS SOSIAL			500	500	100.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	30			130	130	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			140	140	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gahung, tenda logistik, velbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	1			1	1			APBD	DINAS SOSIAL			2	2			APBD	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	30			35	35	18.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			40	40	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pantii Sosial		312	358	358			425.000.000	267.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	500	500			490.000.000	325.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			3	3		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3		3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	1			3	3		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3		3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	186			55	55	250.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			70	70	300.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1			4	4		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			2	2		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	106			200	200		250.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			300	300		300.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			2	2		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3		3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	10			30	30	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			40	40	90.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	peremuan	1			2	2	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			3	3	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1			5	5	-	3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			7	7	-	5.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3	-	3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1			45	45	85.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			60	60	90.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	50	154	154			419.000.000	10.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	171	171			428.000.000	10.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			6	6		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			2	2		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	1			5	5		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			2	2		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	35			60	60	320.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			65	65	320.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1			2	2		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			2	2		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1			2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Pertemuan	1			3	3	7.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			2	2	9.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	15			15	15	7.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	9.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1			50	50	85.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			60	60	90.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	86	192	192			98.000.000	229.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	217	217			98.000.000	239.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			6	6	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			6	6	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5			10	10	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			15	15	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	81			100	100		220.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			110	110		230.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga /outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Pertemuan	1			3	3	8.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			3	3	8.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/ rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanjar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanjar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanjar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1			50	50	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			60	60	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	40	103	103			98.000.000	16.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	110	110			109.000.000	16.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlanjar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			5	5		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			5	5		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	1			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1			3	3		3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3		3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1			6	6	-	5.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			6	6	-	5.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis/pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Pertemuan	1			3	3	8.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			3	3	9.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		312	520	520			525.000.000	325.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			3	3		3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	1			3	3		3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	186			70	70	325.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1			2	2		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	106			320	320		300.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			3	3		3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	10			40	40	100.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan /nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	pertemuan	1			3	3	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1			7	7	-	5.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3	-	3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3	-	3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1			60	60	90.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	50	181	181			430.000.000	11.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			2	2		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan ke darurat/layanan reaksi cepat layanan ke darurat/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	1			2	2		2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	35			70	70	320.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1			2	2		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			2	2	-	2.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan / olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan social adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikosocial agar dapat meningkatkan keberfungsian social (seperti pekerja social, alat peraga, alat tulis)	Orang	1			2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan social kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan social kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Pertemuan	1			2	2	9.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	15			30	30	11.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1			60	60	90.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	86	232	232			98.000.000	249.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			6	6	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan ke darurat/layanan reaksi cepat layanan ke darurat/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5			20	20	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	81			120	120		240.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			2	2	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Pertemuan	1			3	3	8.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1			60	60	80.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	40	119	119			119.000.000	16.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1			5	5		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	1			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1			3	3		1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1			3	3		3.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan social adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikosocial agar dapat meningkatkan keberfungsian social (seperti pekerja social, alat peraga, alat tulis)	Orang	1			6	6	-	5.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan social kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan social kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Pertemuan	1			3	3	9.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1			3	3	-	1.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	40			70	70	110.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
m	Layanan Rujukan	orang	1			3	3			APBD	DINAS SOSIAL
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	1			3	3	-			

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan

dasar.

- f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
 - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan

waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang

diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Purworejo, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

1. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - a. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - b. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - c. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 - d. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - 1) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - 2) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - 3) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - 4) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
2. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
 - a. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - b. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan

penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

- c. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - d. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - e. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
3. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- a. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - b. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - c. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
4. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- a. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - b. Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - c. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran

tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?

- d. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- e. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- f. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbans pada berapa banyak warga yang terlayani?
- g. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layann Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak

pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

1. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - a. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - b. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - c. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - a. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - b. Bagaimana SPM diposisikan?
 - c. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - d. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - e. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
3. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - a. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

- b. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
- c. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Purworejo.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Purworejo berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Purworejo secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI